

***E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE****

(Studi pada Unit LPSE Kota Batam)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**HEDINAR KHAIRUNNISYA**

**NIM: 145030101111060**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2018**

**MOTTO**

**“THEY ALWAYS SAY TIME CHANGES THINGS, BUT YOU  
ACTUALLY HAVE TO CHANGE THEM YOURSELF”**

**ANDY WARHOL**

*Skripsi ini kupersembahkan untuk Mama dan Papa tersayang.*

*Yang mengupayakan segalanya untukku, yang tak pernah  
lelah mencurahkan doanya untukku.*

*Serta untuk mereka, saudara dan sahabat-sahabat yang  
kusayangi, yang menemani aku mendaki, menjadi tempatku  
berkeluh kesah dan memberikan segala motivasi.*

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

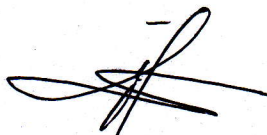
**Judul** : *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada  
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota  
Batam sebagai Upaya Terwujudnya *Good Governance*.

**Disusun oleh** : Hedinar Khairunnisya  
**NIM** : 145030101111060  
**Fakultas** : Ilmu Administrasi  
**Jurusan** : Administrasi Publik  
**Konsentrasi** : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 12 April 2018

### **Komisi Pembimbing**

**Ketua Komisi Pembimbing**



**Dr. Abdullah Said, M. Si.**  
**NIP. 19570911 198503 1 003**

**Anggota Komisi Pembimbing**



**Nurjati Widodo, S.AP, M.AP**  
**NIP. 830129 03 1 1 0275**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Mei 2018  
Jam : 09.00 – 09.45  
Skripsi atas Nama : Hedinar Khairunnisya  
Judul Skripsi : *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai Upaya Terwujudnya *Good Governance*.  
(Studi pada Unit LPSE Kota Batam)

dan dinyatakan

**LULUS**


## MAJELIS PENGUJI

**Ketua**




**Dr. Abdullah Said, M. Si.**  
NIP. 19570911 198503 1 003

**Anggota**




**Dr. Mardiyono, M.PA.**  
NIP. 19520523 197903 1 001

**Anggota**



**Nurjati Widodo, S.AP, M.AP**  
NIP. 830129 03 1 1 0275

**Anggota**



**Andhyka Muttaqin, S.AP, M.AP**  
NIP. 2011078504211001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ( UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 April 2018

Mahasiswa



Hedinar Khairunnisya

NIM.145030107111023



## RINGKASAN

Hedinar Khairunnisya, 2018, ***E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai Upaya Terwujudnya Good Governance (Studi pada Unit LPSE Kota Batam)***, Dr. Abdullah Said, M.Si, Nurjati Widodo, S.AP, M.AP, 135 hal.

---

*E-Procurement* merupakan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya *E-Procurement* dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa. Dengan menerapkan layanan pengadaan secara elektronik ini, diharapkan prinsip-prinsip *good governance* dapat terwujud.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Unit LPSE Kota Batam. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles & Huberman dalam Sugiyono (2014).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa, walaupun belum secara sempurna namun dukungan (*support*) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam dengan sumber daya kapasitas (*capacity*) yang tersedia telah dapat membantu Unit LPSE Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit LPSE Kota Batam dan berhasil memberikan nilai serta manfaat (*value*) bagi beberapa pihak terkait sesuai dengan beberapa prinsip *good governance*. Dalam menerapkan sistem *E-Procurement* ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Unit LPSE Kota Batam, baik berasal dari dalam maupun luar Unit LPSE Kota Batam. Kendala tersebut seperti terkait kepastian hukum, fasilitas penunjang, koordinasi dan terkait sosialisasi. Se jauh ini Unit LPSE Kota Batam telah berupaya secara maksimal untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan atas penelitian ini terkait penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit LPSE Kota Batam yaitu alangkah baiknya setiap pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan menjalin koordinasi yang lebih erat dan akurat. Kemudian pihak LPSE Kota Batam perlu memastikan para peserta sosialisasi yang mengikuti *training user* menerima dan merasakan manfaatnya. Sebaiknya pula, berbagai kebutuhan fasilitas penunjang kinerja Unit LPSE Kota Batam lebih dipenuhi agar penerapan *E-Procurement* ini dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

Kata Kunci : *E-Procurement*, Pengadaan Barang/Jasa, LPSE, *Good Governance*

## SUMMARY

Hedinar Khairunnisya, 2018, **E-Procurement in Procurement of Goods and Services at the Electronic Procurement Service Unit (LPSE) as an Effort to Achieve Good Governance (Study on LPSE Unit of Batam City)**, Dr. Abdullah Said, M.Si, Nurjati Widodo, S.AP, M.AP, 135 page.

---

E-Procurement is a goods and services procurement system that uses technology, information, and electronic transaction in accordance with the applicable acts. The E-Procurement system is established by virtue of the Presidential Instruction No. 2 year 2003 on *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government* in which later followed by Presidential Decision No. 80 year 2003 that subsequently replaced by Presidential Decree No. 54 year 2010 regarding the *Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa*. By the application of such procurement system, it's expected that all of the good governance principle would be materialized.

The research method used in this research is descriptive with qualitative approach. The research site is LPSE Unit of Batam City. Writer uses primary data of both interview and documentation, while the secondary data is retrieved from documents that are related to the research theme. The data collecting techniques used are interview, observation and documentation. The analytical method used in this research is interactive model by Miles & Huberman in Sugiyono (2014).

This research revealed that, even not perfectly, but the support which was given by Batam's government, with available of capacity source, already helped unit LPSE Batam city in applying E-Procurement in providing goods and services for some aspects which is involved with few principles of good governance. In applying E-Procurement system, there are some obstacles, which is came from inside and outside unit LPSE Batam city. One of them is related with legal certainty, support facilities, coordination & socialization. So far LPSE Unit of Batam City has worked maximally to overcome the obstacles.

Some advices that can be considered for this research, especially about applying E-Procurement in providing the goods and services in LPSE Unit of Batam City is that it will be better if all aspects involved in the activity providing can be tied better. Then LPSE Batam city needs to make sure that participants of training socialization can accept and accurate feel of utility. And it would be better if all facility that can be used as work support of LPSE Unit Batam City is fulfilled. So applying E-Procurement system can create the principles of good governance.

**Keywords:** E-Procurement, Procurement of Goods/Services, LPSE, Good Governance



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “***E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai Upaya Terwujudnya Good Governance (Studi pada Unit LPSE Kota Batam)***”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, PhD selaku Ketua Jurusan Fakultas Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



4. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberi motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.
5. Bapak Nurjati Widodo, S.AP, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, memberi arahan serta motivasi kepada penulis secara teori maupun moral untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing penulis selama kuliah di Universitas Brawijaya.
7. Bapak Indra Sufian, M.Eng selaku Kepala Unit LPSE Kota Batam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Unit LPSE Kota Batam serta memberikan banyak bantuan, arahan dan informasi terkait Unit LPSE Kota Batam.
8. Ibu Eka Putri Yunita, S.T selaku Admin PPE Unit LPSE Kota Batam beserta seluruh pegawai yang tergabung dalam Tim Pengelola LPSE Kota Batam yang telah memberikan banyak bantuan, arahan dan informasi kepada penulis selama penelitian.
9. Kedua orang tua penulis, Papa Drs. Herman Subarji dan Mama Dra. Diah Sri Purwanti, yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan

doa serta memberikan dorongan dan semangat dalam berbagai bentuk untuk penulis.

10. Kedua saudara penulis yang tersayang, Hedini Febrini, S.AP, dan Deril Herdian S.E, serta keluarga besar Mama dan Papa di Malang yang selalu memberikan motivasi untuk penulis.
11. Teman-teman di Malang, Manis Manja Group (Azmi, Fathan, Irul, Qonita, Rizal, Gading, Aldy dan Ozi), Arum dan Deanurva, Riri, Monic, Agra, Nofemelia, Dea, Dias, Betty dan teman-teman yang selalu menemani penulis selama di Malang, menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat yang penulis cintai dari Batam, Irwin Nandito, Chaca, Heni, Cristian, Marina, Muthia, Nindy, Raka P, Raka D, Praba, Bobby, Yakop, Boy, Maspus dkk, teman-teman Alumni SD Kartini 2 Batam, SMP Kartini 2 Batam, dan SMA kartini Batam yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya tulis skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2018

Penulis



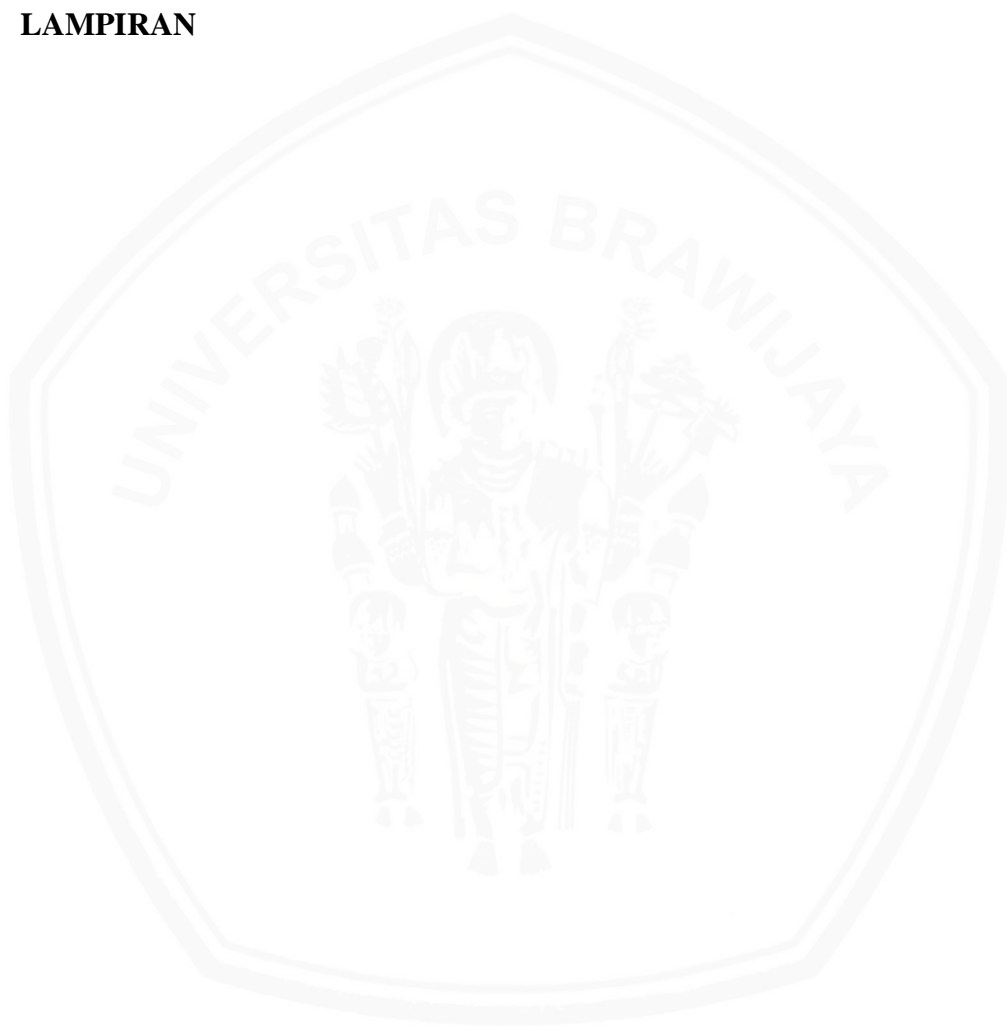
## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I            PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Sitematika Penulisan .....	12
 <b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>15</b>
A. <i>Good Governance</i> .....	15
1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	15
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	21
B. Sistem Informasi Manajemen .....	26
1. Sistem Informasi .....	26
2. Sistem Informasi Manajemen .....	27
3. Sistem .....	29
4. Informasi .....	30
5. Manajemen .....	32
C. <i>E-Government</i> .....	32
1. Pengertian <i>E-Government</i> .....	32
2. Peraturan tentang <i>E-Government</i> .....	41
D. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	42
1. Pengertian Barang/Jasa Pemerintah .....	42
2. Barang .....	46
3. Jasa .....	47
4. <i>E-Procurement</i> .....	49
5. Unit LKPP .....	51
6. Unit LPSE .....	53

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A.	Jenis Penelitian .....	57
B.	Fokus Penelitian .....	58
C.	Lokasi dan Situs Penelitian .....	59
D.	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	60
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	62
F.	Instrumen Penelitian .....	64
G.	Metode dan Analisa Penelitian .....	66
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	68
1.	Gambaran Umum Kota Batam.....	68
a)	Visi dan Misi .....	69
b)	Geografis dan Iklim .....	70
c)	Kependudukan .....	71
2.	Gambaran Umum Unit LPSE Kota Batam .....	72
a)	Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam .....	72
b)	Struktur Organisasi Unit LPSE Kota Batam .....	76
c)	Tugas dan Fungsi Unit LPSE Kota Batam .....	77
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian .....	78
1.	Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya <i>Good Governance</i> .....	78
a)	<i>Support</i> .....	80
b)	<i>Capacity</i> .....	86
c)	<i>Value</i> .....	93
2.	Kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan <i>E-Procurement</i> sebagai upaya mewujudkan <i>good governance</i> .....	109
a)	Faktor Internal .....	110
b)	Faktor Eksternal .....	112
C.	Analisa dan Interpretasi Data .....	116
1.	Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya <i>Good Governance</i> .....	116
d)	<i>Support</i> .....	116
e)	<i>Capacity</i> .....	122
f)	<i>Value</i> .....	125
2.	Kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan <i>E-Procurement</i> sebagai upaya mewujudkan <i>good governance</i> .....	126
c)	Faktor Internal .....	126
d)	Faktor Eksternal .....	129



<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A.	Kesimpulan .....	132
B.	Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>136</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

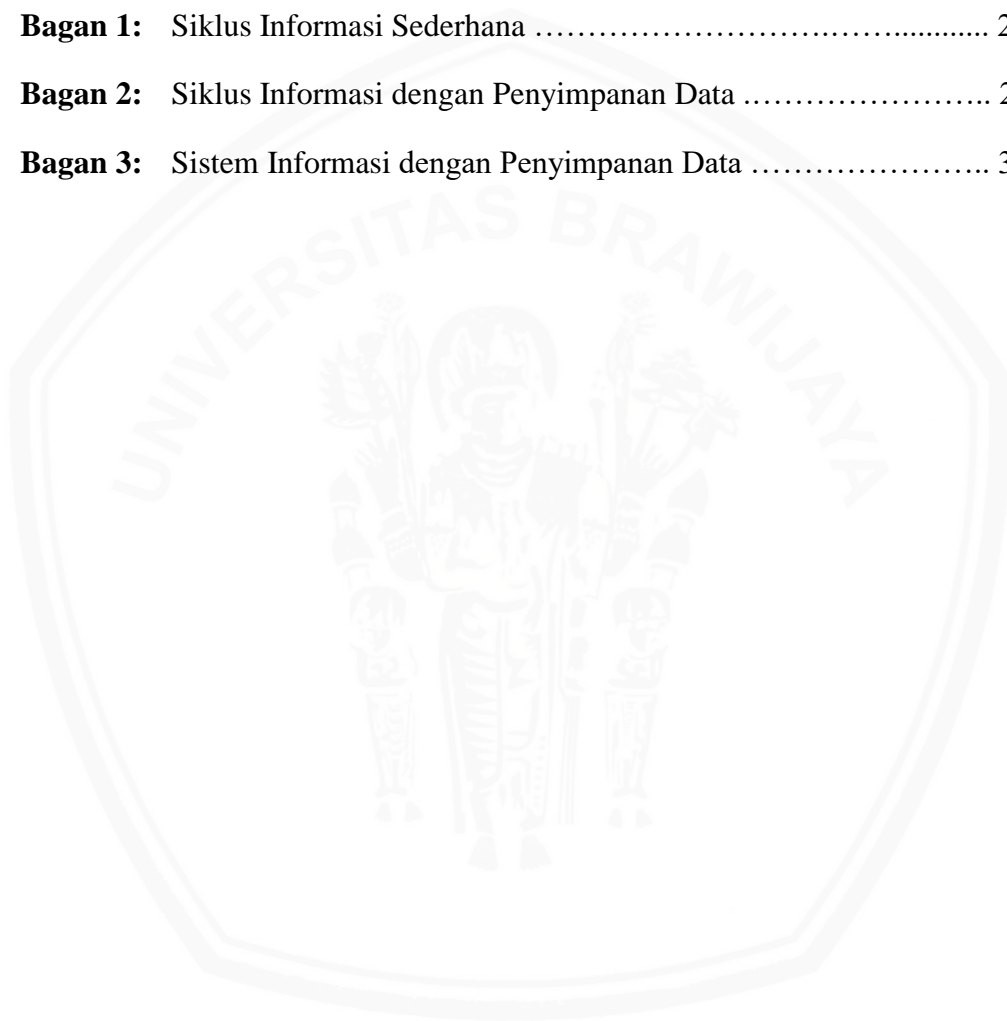


## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
<b>Tabel 1:</b>	Progres Implementasi LPSE Indonesia Tahun 2008-2017 .....	5
<b>Tabel 2:</b>	Status Transaksi LPSE Indonesia Hingga 2017 .....	6
<b>Tabel 3:</b>	Perbedaan <i>Government</i> dengan <i>Governance</i> .....	19
<b>Tabel 4:</b>	Susunan Tim Pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam .....	89
<b>Tabel 5:</b>	Bentuk Badan Usaha yang Dikelola 2011 – Agustus 2017 .....	94
<b>Tabel 6:</b>	Rekapitulasi Realisasi Lelang per <i>Agency</i> Tahun 2013 .....	95
<b>Tabel 7:</b>	Rekapitulasi Realisasi Lelang per <i>Agency</i> Tahun 2014 .....	96
<b>Tabel 8:</b>	Rekapitulasi Realisasi Lelang per <i>Agency</i> Tahun 2015 .....	97
<b>Tabel 9:</b>	Rekapitulasi Realisasi Lelang per <i>Agency</i> Tahun 2016 .....	97
<b>Tabel 10:</b>	Rekapitulasi Realisasi Lelang per <i>Agency</i> Tahun 2017 .....	98
<b>Tabel 11:</b>	Rekapitulasi Lelang Berdasarkan Kategori Tahun 2013 – 2017	99
<b>Tabel 12:</b>	Perbandingan Verifikasi Penyedia Baru Tahun 2016 – 2017 ...	101
<b>Tabel 13:</b>	Perbandingan Penanganan/Konsultasi Masalah LPSE Tahun 2016 – 2017 .....	102
<b>Tabel 14:</b>	Perbandingan Penggunaan <i>Computer Bidding</i> Tahun 2016 – 2017 .....	103
<b>Tabel 15:</b>	Perbandingan <i>Training</i> Pengguna Tahun 2016 – 2017 .....	103
<b>Tabel 16:</b>	Perbandingan Konsultasi/Pendaftaran SiRUP Tahun 2016 – 2017 .....	104
<b>Tabel 17:</b>	Perbandingan <i>Training</i> SiRUP Tahun 2016 – 2017 .....	104

## DAFTAR BAGAN

No.	Judul	Halaman
<b>Bagan 1:</b>	Siklus Informasi Sederhana .....	26
<b>Bagan 2:</b>	Siklus Informasi dengan Penyimpanan Data .....	27
<b>Bagan 3:</b>	Sistem Informasi dengan Penyimpanan Data .....	31



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
<b>Gambar 1:</b>	Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Model Interaktif oleh Miles & Huberman .....	66
<b>Gambar 2:</b>	Peta Kota Batam .....	68
<b>Gambar 3:</b>	Tampilan Halaman Utama <i>Website</i> Unit LPSE Kota Batam	74
<b>Gambar 4:</b>	Struktur Organisasi Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam	76
<b>Gambar 5:</b>	Sistem <i>E-Procurement</i> Nasional Dikembangkan oleh LKPP	79
<b>Gambar 6:</b>	Kantor Unit LPSE Kota Batam .....	91
<b>Gambar 7:</b>	Ruangan Kerja Unit LPSE Kota Batam .....	91
<b>Gambar 8:</b>	<i>Bidding Room</i> dan <i>Computer Bidding</i> Unit LPSE Kota Batam .....	92
<b>Gambar 9:</b>	<i>Server</i> Unit LPSE Kota Batam .....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

1. *Interview Guide*.
2. Surat Rekomendasi Penelitian ke Unit LPSE Kota Batam dari Bakesbangpol Batam.
3. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Unit LPSE Kota Batam dari Bakesbangpol Batam.
4. Dokumentasi penelitian (foto bersama).
5. Lampiran beberapa dokumen dan formulir terkait pengadaan secara elektronik.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan pada sektor pengadaan barang/jasa di Indonesia semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan sistem *E-Procurement* oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Indonesia yang dimaksudkan untuk mempermudah proses pengadaan dan meminimalisir maraknya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada sektor pengadaan barang/jasa. Praktek KKN yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ialah kurangnya transparansi dari panitia pengadaan barang/jasa itu sendiri dan kurang ditegakkannya supremasi hukum pada sektor pengadaan barang/jasa. Bila dikupas lebih dalam, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktek KKN. Padahal, kegiatan pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk membangun negara dan meluncurkan berbagai program pemerintah. Dari sudut pandang ini kita dapat memahami bahwa dampak positif dari kemajuan sistem yang bernama *E-Procurement* ini tidak luput dari dampak negatifnya pula. Maka dari itu, dibutuhkan reformasi birokrasi yang tegas dan konsisten dalam menghadapi isu-isu pengadaan barang/jasa ini.

Reformasi birokrasi juga terjadi pada tata laksana pemerintahan, hal ini ditujukan untuk mewujudkan *good governance* yang berarti tata pemerintahan



yang baik. Bintoro Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006:23) memandang *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang di dalam negara berkembang. Contoh yang menarik dalam penerapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance* ialah pengadaan barang/jasa pemerintah yang memanfaatkan kebaikan dari sistem *E-Procurement*. Hal ini turut membuktikan adanya kemauan sumber daya aparatur negara dan masyarakat Indonesia yang berperan sebagai *agent of change* untuk menerima hal baru yang di era kemajuan zaman.

Adapun beberapa prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip oleh Tangkilisan (2005:115) yang perlu diwujudkan, diantaranya; partisipasi (*participation*), penerapan hukum (*fairness*), transparansi (*transparency*), responsivitas (*responsiveness*), orientasi (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas (*effectiveness*), akuntabilitas (*accountability*) dan strategi visi (*strategic vision*). *Good governance* berorientasi pada terciptanya organisasi pemerintah yang menganut prinsip-prinsip *good governance* serta melakukan perbaikan terhadap segala kekurangan yang ada pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* yang ada diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia dan dalam menerapkan sistem *E-Procurement* pada sektor pengadaan barang/jasa.

Menurut *Australian Government Information Management, E-Procurement* merupakan pembelian antar bisnis (*business to business*, B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet (Diakses dari: <https://www.finance.gov.au/agict/procurement/>). Sedangkan menurut Christopher & Schooner (2007) *procurement* atau pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dari pengertian ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *E-Procurement* adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan secara elektronik, dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta memperhatikan kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.

*E-Procurement* sendiri merupakan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya *E-Procurement* dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa. *E-Procurement* menerapkan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *online* dengan harapan sistem ini selain akan meningkatkan transparansi, efektivitas dan efisiensi proses pengadaan serta mewujudkan beberapa prinsip *good governance* lainnya. Penerapan sistem *E-Procurement* secara tidak langsung juga

dapat mendukung proses *monitoring* dan evaluasi serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real-time* pada penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

*E-Procurement* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang bernaung di bawah Lembaga Kebijakan Penyedia Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut LPSE Nasional, LPSE (khususnya di dalam institusi pemerintahan Indonesia) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang *e-Tendering*, serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik LPSE juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan data dari *Smart Report* LPSE-LKPP, progres implementasi LPSE di Indonesia saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 hanya berjumlah 11 Unit LPSE. Namun hingga saat ini sesuai data per 3 November 2017, jumlah Pengguna LPSE sebanyak 635 instansi telah tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jumlah ini tidak stagnan dan kemungkinan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kebutuhan para penggunanya. Bila dijumlahkan mulai dari tahun 2008 hingga 2017 saat ini, jumlah lelang mencapai 819.917 lelang, dengan nilai pagu Rp 1.877.832.342. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari program ini begitu terasa oleh banyak pihak. Pernyataan-pernyataan ini dibuktikan oleh tabel berikut:

**Tabel 1: Progres Implementasi LPSE Indonesia Tahun 2008–2017**

No.	Deskripsi	2008	2013	2014	2015	2016	2017
1	LPSE System Provider	11 Unit	547 Unit	597 Unit	620 Unit	620 Unit	620 Unit
2	LPSE Service Provider	0 Unit	55 Unit	19 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
3	LPSE	11 Unit	602 Unit	616 Unit	635 Unit	635 Unit	635 Unit
4	Prov. Terlayani	9 Provinsi	33 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
5	Instansi Terlayani	11 Instansi	731 Instansi	731 Instansi	731 Instansi	731 Instansi	731 Instansi

*Sumber: Smart Report LPSE – LKPP V2, 3 November 2017*

Dari tabel di atas kita dapat memperhatikan adanya proses dan perkembangan dari LPSE, kemudian pada tabel berikutnya kita dapat memperhatikan progres status transaksi LPSE Indonesia yang penulis sajikan yang bersumber dari *Smart Report* LPSE mulai tahun awal dioperasikannya LPSE sejak tahun 2008 hingga lima tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2013 hingga tahun 2017.

**Tabel 2: Status Transaksi LPSE Indonesia Tahun 2008–2017**

No.	Deskripsi	2008	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Lelang	33	131.908	136.097	161.513	147.555	118.859
2	Nilai Pagu (Juta Rp)	52.500	249.394.629	310.050.601	318.434.775	398.995.119	379.534.687
3	Jumlah Lelang Selesai	33	122.505	129.681	129.216	135.917	102.288
4	Nilai Pagu Selesai (Juta Rp)	42.898	214.286.561	213.869.090	242.722.527	305.799.106	264.190.127
5	Nilai Hasil Lelang (Juta Rp)	36.286	192.490.242	195.884.370	218.116.469	277.486.846	234.507.534
6	Selisih Pagu dan Hasil Lelang (Juta Rp)	6.612	21.796.319	17.984.721	24.606.058	28.312.260	29.682.593
7	Selisih Pagu dan Hasil Lelang (%)	15,41	10,17	8,41	10,14	9,26	11,24
8	Selisih HPS dan Hasil Lelang (Juta Rp)	-	14.995.465	11.460.013	13.439.744	18.951.868	18.140.813
9	Selisih HPS dan Hasil Lelang (%)	-	7,00	5,36	5,54	6,20	6,87
10	Jumlah PPK *	101	32.923	40.45	40.856	40.872	58.215
11	Jumlah Panitia *	222	109.349	149.667	196.154	238.559	275.212
12	Penyedia						
	a. Jumlah Penyedia Terdaftar *	1.153	333.505	333.505	373.597	401.356	401.356
	b. Jumlah Penyedia Terverifikasi *	972	228.945	228.945	253.532	271.438	271.555
	c. Jumlah Penyedia tertolak *	9	1.208	1.208	1.332	1.404	1.404
	d. Jumlah Penyedia Terkoreksi	-	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Penyedia Terblacklist **	6	886	1.083	808	532	504

Sumber: *Smart Report LPSE – LKPP V2, 3 November 2017*

Perkembangan sistem *E-Procurement* dalam beberapa tahun ini kian tumbuh pesat dan terus berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan yang berlaku di kalangan masyarakat. Selain itu alasan yang lebih signifikan atas perkembangan sistem ini ialah adanya acuan berupa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang tidak ada dalam peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 130 ayat (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan adanya kewajiban pembentukan unit layanan pengadaan secara permanen dan profesional paling lambat tahun 2014, dan Pasal 131 ayat (1), keharusan melaksanakan lelang secara elektronik (*E-Procurement*) paling lambat tahun 2012. Salah satu Kota yang sudah mengimplementasikannya adalah Kota Batam.

Pemerintah Kota Batam telah menerapkan sistem *E-Procurement* sejak tahun 2009 dan merupakan kota pertama di Provinsi Kepulauan Riau yang menerapkan sistem *E-Procurement*. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh positif dan motivasi bagi kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, tidak hanya kota namun juga berbagai instansi maupun lembaga/pihak berkepentingan yang juga membutuhkan kebaikan dari sistem ini. Terkait dengan perjalanan *track of record* Unit LPSE Kota Batam yang selama perkembangannya di bawah pantauan LKPP, Unit LPSE Kota Batam pernah meraih peringkat terbaik ke-4 pada tahun 2009 dalam pengelolaan *E-Procurement* se-Indonesia dengan tingkat efisiensi mencapai 10,14% pada tahun 2009 dan terbaik ke-5 pada tahun 2010 dengan tingkat efisiensi mencapai 15,98%. Namun, pada tahun 2011 tingkat efisiensi atau penghematan dengan sistem ini turun menjadi 13,23%.



Pencapaian tersebut tidak lepas dari banyaknya faktor dukungan maupun hambatan yang mempengaruhi kinerja Unit LPSE Kota Batam dalam menjalankan sistem *E-Procurement*. Selain dukungan yang berupa kebijakan-kebijakan terkait *E-Procurement*, adanya berbagai sumber daya yang dapat diberdayakan, kemajuan teknologi serta pemanfaatannya, adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit LPSE Kota Batam yang harus ditemukan solusi untuk mengatasinya agar kinerja Unit LPSE Kota Batam dapat kembali stabil dan terus meningkat.

Kembali mengingat bahwa salah satu tujuan menerapkan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah juga untuk meminimalisir terjadinya praktek KKN. Dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mayoritas kasus korupsi terbesar adalah kasus pengadaan barang/jasa. Sebanyak 366 atau sekitar 78% jenis korupsi yang ditangani oleh KPK sangat terkait dengan kasus penyuapan dan pengadaan barang/jasa pemerintah atau *E-Procurement*. Hingga tahun 2015, KPK telah mencatat kerugian negara akibat korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa nilainya mencapai Rp 1 Triliun.

Perubahan sistem pengadaan barang/jasa yang sebelumnya berbasis konvensional menjadi sistem pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi, atau yang umumnya disebut dengan *E-Procurement* ialah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kasus KKN yang kerap terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Sistem pengadaan barang/jasa secara konvensional telah dianggap usang, rumit, tidak transparan, dan rawan untuk menjadi celah bagi praktek KKN. Saat ini sistem pengadaan barang/jasa yang konvensional telah digantikan dengan sistem *E-Procurement* yang lebih ringkas, efektif, efisien, lebih

transparan dan dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang ingin diwujudkan.

Di samping dampak positif dan manfaat dari perubahan sistem pengadaan barang/jasa ini, tentu ada pula dampak negatif yang juga merupakan hambatan dan menjadi masalah dalam penerapan sistem *E-Procurement* pada unit LPSE Kota Batam dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Beberapa diantaranya yaitu seperti; masih banyak para penyedia barang/jasa yang belum sepenuhnya menguasai bahkan memahami tentang *E-Procurement* serta peraturannya, belum dibentuknya Unit LPSE Kota Batam sebagai organisasi struktural yang berdiri sendiri, kurangnya kepastian hukum atau kebijakan yang tegas secara menyeluruh tentang proses dan sistem *E-Procurement*, rawannya kebocoran dana dengan minimnya akuntabilitas dari sumber daya aparatur yang ada, kurangnya sumber daya aparatur yang berkompeten sesuai bidangnya pada Unit LPSE, masih adanya pola pikir untuk menggunakan sistem konvensional saat sistem *E-Procurement* menjadi terobosan baru dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, dan kurangnya pendidikan pelatihan serta pemahaman menyeluruh mengenai *E-Procurement* bagi para sumber daya aparatur yang berkaitan dengan proses kegiatan pengadaan barang/jasa.

Kebaikan dari sistem *E-Procurement* saat ini membuat sistem pengadaan barang/jasa secara konvensional ditinggalkan walaupun tidak secara penuh, sistem yang berlaku dipadukan sesuai kebutuhan dan terus ditingkatkan sehingga dapat menjadi suatu sistem yang lebih optimal dan lebih tinggi performanya. Untuk mencapai *good governance* suatu pemerintahan tidak boleh tertinggal dan alangkah

baiknya mau membuka diri untuk hal-hal baru, apalagi pada zaman sekarang kemajuan teknologi sangat membantu banyak pekerjaan pemerintah, sehingga hal baru seperti *E-Procurement* layak diberi kesempatan untuk dapat diterima di masyarakat.

Dalam konteks inilah, maka penulis bermaksud untuk membahas lebih dalam mengenai proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem *E-Procurement* yang merupakan perwujudan dari *good governance* dengan judul skripsi: “***E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai Upaya Terwujudnya *Good Governance* (Studi pada LPSE Kota Batam).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *Good Governance*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *Good Governance*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulisan tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *Good Governance*.
2. Untuk memahami tentang kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *Good Governance*.

### D. Kontribusi Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak, diantaranya:

1. Kontribusi Akademis
  - a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembelajaran bagi mahasiswa dalam bidang studi Administrasi Publik terkait perkembangan dan proses penerapan pengadaan barang/jasa pada Unit LPSE Kota Batam untuk ke depannya.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan oleh penulis sebagai sarana untuk mencari ilmu dan informasi dalam bidang studi Administrasi Publik

mengenai kebijakan publik dan analisis terhadap perkembangan dan proses pengadaan barang/jasa pada Unit LPSE Kota Batam, sehingga tulisan lain setelah karya tulis ilmiah ini menjadi lebih baik ke depannya.

## 2. Kontribusi Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi bagi pemerintah terkait dalam pengambilan keputusan dan menjalankan proses pengadaan barang/jasa pada Unit LPSE Kota Batam, sehingga ke depannya proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan lebih baik, objektif, akuntabel dan berkualitas, serta sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang ingin diwujudkan.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat dalam menentukan sikap serta merespon adanya kebijakan ataupun program yang dibuat oleh pemerintah, khususnya terkait perkembangan dan proses penerapan pengadaan barang/jasa pada Unit LPSE Kota Batam, sehingga ke depannya pemahaman masyarakat tentang proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih baik dan lebih luas.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, masing-masing bab memberikan pokok pembahasan yang saling terkait satu sama lain dan tersusun secara sistematis sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini akan menguraikan latar belakang dari penulisan skripsi ini, yaitu alasan mengapa proses penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa pada Unit LPSE Kota Batam begitu penting dan menarik untuk dibahas. Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang kerap kali terjadi sangat merugikan negara dapat diminimalisir dengan menerapkan sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa pada Unit LPSE Kota Batam. Hal ini juga dapat didukung dengan adanya landasan hukum yang harus terus diperkuat, *monitoring* yang efektif, efisien, dan transparan serta kerja sama dari sumber daya aparatur dan pihak-pihak yang terkait dalam proses penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa pada Unit LPSE Kota Batam, karena penerapan sistem *E-Procurement* pada Unit LPSE Kota Batam ini turut merupakan upaya dalam mewujudkan *good governance*. Bab ini juga berisi tentang rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, kontribusi penulisan dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi acuan dasar dalam penulisan skripsi ini. Isinya berupa landasan teori dan pernyataan dari para ahli. Terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan topik penyusunan skripsi, antara lain teori serta kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *E-Procurement*, pengadaan barang/jasa pada Unit LPSE se-Indonesia termasuk Unit LPSE Kota Batam, serta teori mengenai *good governance*.



**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang metode-metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta metode dan analisa data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil penulisan yang meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama mengobservasi dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah beserta alternatif penyelesaiannya.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan hasil observasi lapangan. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan guna melakukan perbaikan di masa yang akan datang dan memberikan manfaat bagi pembacanya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Good Governance*

##### 1. Pengertian *Good Governance*

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government*. Pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsep *governance* tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Rochman, 2000: 141). Sejalan dengan konsep *governance*, Santosa (2008: 130) menegaskan bahwa dalam tatanan pengelolaan pemerintahan, ada tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berdasarkan pendapat Rochman dan Santosa, dapat disimpulkan bahwa konsep

*governance* melibatkan tidak hanya sektor pemerintah tetapi juga sektor lain di luar pemerintah, seperti sektor swasta dan masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2000:1) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara/pemerintah dalam melaksanakan penyediaan *public good and services*. Lebih lanjut LAN (2000: 5) menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Dengan kata lain, *governance* yang dimaksud LAN yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan yang perlu perhatikan fungsinya agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Pinto (1994), istilah *governance* mengandung arti praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum dan khususnya pembangunan ekonomi. Menurut Kooiman (1993), *governance* merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Adapun menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2002: 34) *governance* berarti memerintah, menguasai, mengurus, mengelola. Istilah *governance* menunjukkan suatu proses ketika rakyat mampu mengatur ekonominya, institusi, dan sumber-sumber sosial serta politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kemampuan suatu negara mencapai

tujuan negara sangat bergantung pada kualitas tata pemerintahan, yaitu pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat (Thoha, 2000: 12).

Pada dasarnya, para ahli mengartikan *governance* sebagai proses pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat serta bidang yang berkaitan untuk mencapai suatu tujuan negara.

Pengertian istilah *good* adalah nilai-nilai yang sesuai dengan keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Selain itu, istilah *good* merupakan aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.

Pierre Landell-Mills & Ismael Serageldin (1992) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Robert Charlick dalam Pandji Santosa (2008:130) mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Indrajit (2006) *good governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategis.

Dapat disimpulkan bahwa baik ungkapan Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin, Robert Charlick maupun UNDP bermaksud untuk mengungkapkan definisi *good governance* sebagai pengelolaan urusan publik yang di dalamnya terjadi hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lembaga Administrasi Negara (2006:6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*).

Selanjutnya, atas definisi tersebut dalam *good governance* terdapat tiga unsur berkaitan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hidup saling berkaitan satu sama lain dengan mengedepankan beberapa nilai yang dianggap penting. Pada paradigma-paradigma sebelumnya, rakyat merupakan sisi lain yang terpisah dari pemerintah, berarti rakyat yang harus mengikuti keinginan pemerintah melalui aturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, namun pada zaman reformasi birokrasi ini, aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara demokratis dan masyarakat menjadi lebih partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di era *governance*.

Perubahan paradigma dari pengertian pemerintahan (*government*) antara lain unsur kekuasaan (*power*) diubah menjadi unsur kewenangan (*authority*) yang

bertugas melayani masyarakat atau *public service*. Pemerintah dalam keberadaannya sebagai pelayan terhadap kebutuhan masyarakat di banyak bidang kehidupan masyarakat luas, bukan berarti rakyat atau masyarakat yang melayani pemerintah seperti beberapa periode masa lalu. Perubahan paradigma tersebut memerlukan waktu karena kesiapan aparatur pemerintahh atau masyarakat perlu proses dan perapan yang baik.

Transformasi struktural kemudian terjadi dan ditandai dengan proses demokratisasi yang semakin tumbuh dan berkembang, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintah, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dinamika interaksi sosial, politik, dan ekonomi antara pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan perbedaan antara pemerintah (*government*) dan tata pemerintahan (*governance*) yang dapat mengacu pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Tabel 3: Perbedaan *Government* dengan *Governance***

No.	Government	Governance
1	Kekuasaan ( <i>power</i> ) klasik	Kewenangan/pelayanan/modern
2	Sentralisasi	Desentralisasi (otonomi)
3	Pengerahan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat
4	Dominasi ekonomi	Ekonomi pasar
5	Pembinaan masyarakat	<i>Civil society</i>
6	<i>Top down</i>	<i>Bottom up</i>

Sumber: Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik* (2014:207)

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan pada kedua konsep yang tengah menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. *Government* cenderung menggunakan kekuasaan sedangkan *governance* lebih berorientasi melayani dengan wewenang. Dari segi pembagian urusannya *government* tersentral pada pemerintah pusat, namun *governance* membaginya dalam desentralisasi melalui otonomi daerah atau pemberian wewenang pada setiap daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan. Pada konsep *government* masyarakat dikerahkan, sedangkan konsep *governance* justru memberdayakan masyarakat. *Government* juga melakukan dominasi ekonomi pada para pelaku ekonomi, namun *governance* lebih memperhatikan bagaimana berlangsungnya ekonomi pasar. Masyarakat dibina dalam konsep *government*, tetapi pada konsep *governance* masyarakat diarahkan untuk mencapai *civil society* atau masyarakat madani. Dan pada konsep *government* struktur hierarki pada roda pemerintahan cenderung *top down*, berbeda halnya dengan konsep *governance* yang tidak hanya menerima perintah dari pusat tetapi juga *bottom up*, komunikasi juga dapat dijalin dari bawahan ke atasan. Segala kekurangan yang ada pada pemerintahan sebelumnya terus menjadi acuan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih baik lagi bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan (*governing*) dalam masyarakat saat ini pada intinya yaitu proses koordinasi, pengendalian (*steering*), pengaruh (*influence*), dan penyeimbangan (*balancing*) dari setiap hubungan (interaksi). Artinya, format pemerintahan yang baru diperlukan untuk memenuhi tuntutan perubahan pola interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat.



*Good governance* merupakan sebuah cita-cita yang hendak diwujudkan oleh suatu negara. Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja negara, membuat pemerintah akuntabel, dan membangun pelaku-pelaku di luar negeri untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat. Dalam konteks ini, tidak ada suatu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik tanpa beradaptasi maupun mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintahannya.

Pada intinya adalah institusi *governance* harus efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang dari pada melakukan kontrol pada era *good governance* ini, dengan demikian kita dapat merasakan sinergi yang harmonis antara ketiga pilar penting dalam *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

## 2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab akan dapat tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi, ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) yang dikutip dari buku terbitan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (2000: 23) tentang akuntabilitas dan *good governance*, prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi. Setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Kepastian Hukum (*Rule of Law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturannya hukum dan hak azasi manusia.
3. Transparansi. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
4. Tanggung Jawab (*Responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan

dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*). Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*Equity*). Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan Efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*). Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Santosa (2008: 131) mengatakan bahwa syarat terciptanya *good governance*, meliputi beberapa kriteria yaitu; partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas.

1. Partisipatoris. Setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya)
2. *Rule of Law* (Penegakan Hukum). Harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
3. Transparansi. Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
4. *Responsiveness*. Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “*basic needs*” (kebutuhan dasar) dan Hak Azasi Manusia (HAM) (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).
5. Konsensus. Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
6. Persamaan Hak. Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

7. Efektivitas dan Efisiensi. Pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara dan lain-lain.
8. Akuntabilitas. Suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009:289).

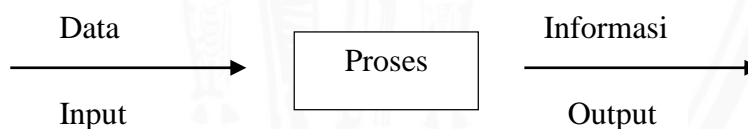
Dapat disimpulkan bahwa ungkapan dari para ahli terkait prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan beberapa nilai yang dianggap penting. Untuk dapat dikatakan tata pemerintahan yang baik suatu pemerintahan harus menganut beberapa prinsip, yaitu; partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

## B. Sistem Informasi Manajemen

### 1. Sistem Informasi

Sistem Informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang terdiri dari sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak jaringan komunikasi, serta data yang saling berinteraksi untuk menerima data sebagai *input*, memproses data dan menghasilkan *output*, yaitu berupa informasi. Menurut Ladjamudin (2005:13) sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi memiliki tiga kegiatan utama dalam Scott (2004:16) yaitu: menerima data sebagai masukan (*input*); kemudian memprosesnya; dan akhirnya memperoleh informasi sebagai keluaran (*output*). Ketiga prosedur kegiatan ini digambarkan sebagai berikut.

**Bagan 1: Siklus Informasi Sederhana**

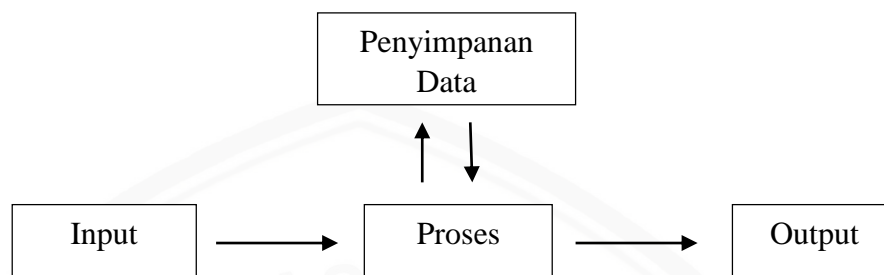


*Sumber: Scott (2004:16)*

Seiring dengan perkembangannya, sistem informasi yang sederhana seperti yang digambarkan oleh Scott dirasa masih kurang relevan karena sebuah data hanya diproses untuk menjadi *output* dan tidak adanya penyimpanan data. Oleh karena itu, perlu ditambahkan penyimpanan data ke dalam model sistem informasi manajemen agar lebih relevan. Dengan begitu, seperti gambaran yang diungkapkan oleh Davis, melalui penyimpanan data pengelolaan informasi bukan hanya

mengubah data dan menjadikannya informasi tetapi juga untuk menyimpan data sebagai pembaharuan untuk pengguna selanjutnya.

### Bagan 2: Siklus Informasi dengan Penyimpanan Data



Sumber: Davis (2002:91)

Sistem informasi memiliki kegiatan yang utama dan saling berhubungan satu sama lain, yaitu *input*, *process*, *storage* dan *control*. Masing-masing kegiatan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan agar kegiatan berjalan dengan baik, apabila salah satu kegiatan tidak berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi kegiatan yang lainnya dan akhirnya akan mempengaruhi *output* yang dihasilkan.

## 2. Sistem Infomasi Manajemen

Pada era modern saat ini, organisasi pada umumnya sudah menggunakan komputer sebagai pendukung sistem informasi, namun demikian tentu saja penggunaan sistem informasi disesuaikan dengan kebutuhan, fungsi dan kemampuan organisasi. Davis (2002:3) mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu (*integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem ini menggunakan pernangkat



keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), prosedur dan *database*. Menurut Kumorotomo dan Margono (2001:8), pengertian tentang Sistem Informasi Manajemen (SIM) di dalam organisasi telah ada sebelum perangkat komputer diciptakan. Inti dari pengertian SIM tentu saja terkandung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, kearsipan, komunikasi antara manajer-manajer organisasi, penyajian informasi untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi dengan tujuan untuk mendukung operasi manajemen dalam memenuhi kebutuhan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan semua pimpinan atau manajer dalam suatu organisasi atau sub unit organisasi.

Scott (2002:100) mengungkapkan bahwa ada beberapa dimensi Informasi Manajemen, sehingga tidak ada definisi yang sederhana dan mampu menggambarkan pengertiannya secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang latar belakang pengertian ilmu sistem sehingga makna dari istilah “Informasi Manajemen” atau SIM agar dapat dipahami sepenuhnya.

Kebutuhan dari berbagai jenis organisasi akan informasi bukanlah hal yang baru lagi, karena sejak dahulu hingga saat ini penanganan suatu sistem informasi sudah banyak dilakukan dengan tujuan kepentingan manajemen. Seperti dalam penanganan pekerjaan-pekerjaan yang sistematis misalnya dalam administrasi terdapat pengagendaan, pengarsipan, pengolahan informasi sebagai bahan dalam

pembuatan keputusan oleh para manajer dan sebagainya. Yang diperbaharui adalah proses penanganannya atau pengelolaannya yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan sarana lain yang bermuatan teknologi.

Untuk menyamakan persepsi mengenai definisi Informasi Manajemen, maka penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari masing-masing komponen Informasi Manajemen atau SIM.

### 3. Sistem

Definisi sistem menurut Jogiyanto (2005:2) adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan, yang dijelaskan oleh McLeod (2001). Adapun penjelasan dalam buku Indrajit (2000:2) mengungkapkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya.

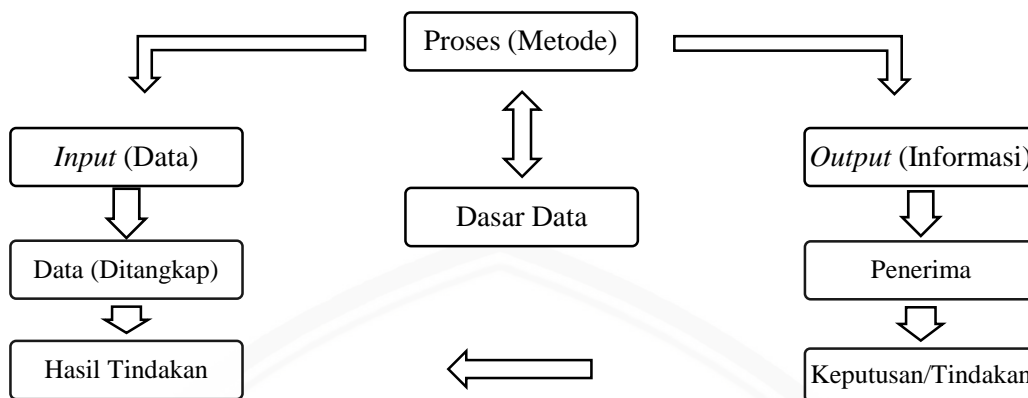
Gordon B. Davis juga mengungkapkan dalam bukunya "*Management Development*" yang dikutip oleh Effendy (1996:51) bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang sama beroperasi untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya, suatu sistem bukan merupakan suatu perangkat unsur-unsur yang dirakit secara sembarangan, namun terdiri dari unsur-unsur yang dapat diidentifikasi sebagai kebersamaan yang menyatu dengan tujuan dan sasaran yang sama. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem ialah sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam mengoperasikan elemen-elemen yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### 4. Informasi

Informasi adalah sebuah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan saat ini maupun untuk di masa yang akan datang. Pernyataan ini didukung oleh Mc Leod (2001:4) yang mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Sedangkan menurut pernyataan yang dinyatakan oleh Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerimanya dan memiliki nilai nyata, terasa bagi keputusan saat ini maupun keputusan mendatang.

Berdasarkan beberapa sumber yang telah memberi ungkapan mengenai definisi informasi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berarti dan bermanfaat bagi penerimanya dalam pengambilan keputusan.

Penyataan ini juga didukung oleh Syamsi (2000:10) yang menyatakan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data dan disimpan secara sistematis agar mudah ditemukan dan dipergunakan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan.

**Bagan 3: Sistem Informasi dengan Penyimpanan Data**

*Sumber: Syamsi (2000:100)*

Sumber informasi adalah data. Data adalah sebuah kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian. Informasi diperoleh setelah data-data mentah diproses atau diolah, begitulah ungkapan Davis (2002:28). Dengan pengertian ini dapat diartikan bahwa data yang awalnya mentah atau tidak memiliki nilai maupun manfaat, setelah diolah dapat menjadi sebuah informasi dan data yang telah diolah tersebut dapat disimpan untuk kepentingan lain selanjutnya.

Informasi digunakan tidak hanya oleh satu pihak dalam organisasi, namun juga digunakan oleh *user* yang membutuhkan informasi. Informasi yang digunakan dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa begunaan sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah menjadi sebuah informasi harus dapat memenuhi kebutuhan, akurat, tepat waktu dan bermanfaat bagi penggunaanya.

## 5. Manajemen

Manajemen merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan/manajer dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Terry yang dikutip oleh Syafie, *et al*, (1999: 50) manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan lainnya. Prinsip-prinsip dalam manajemen meliputi POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Budgeting*) atau lebih ringkas lagi meliputi POAC (*Planning, Organizing, Actuating Controlling*).

Mengacu pada ungkapan Terry, maka manajemen dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer dalam organisasi dengan mengedepankan beberapa prinsip dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### C. *Electronic Government*

#### 1. Pengertian *Electronic Government*

Pemerintahan elektronik atau *e-government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronic government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan

pemerintahan. *Electronic government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi internal maupun eksternal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *electronic government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. (Diakses dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik). 2017.)

Adapun beberapa definisi mengenai *electronic government* dapat menjadi acuan dalam memahami definisi atas *electronic government*. United Nation Development Programme (UNDP) dalam Indrajit (2006) mendefinisikan *electronic government* dengan sederhana, yaitu “*Electronic government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies*”. “*Electronic government* adalah suatu aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari pemerintah.”

Di sisi lain, definisi *electronic government* menurut The World Bank Group (2011) yaitu: “*Electronic government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*” (*Electronic government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network*, internet dan *mobile*

*computing*) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan)).

Kementerian Komunikasi dan Informasi (2015), berpendapat bahwa: “*Electronic government* adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnisnya, dan lembaga-lembaga lain secara *online*”. (Diakses dari: [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id))

Dari berbagai pengertian dari para ahli di atas intinya adalah *electronic government* merupakan poses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Ada dua hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian *electronic government* di atas. Pertama, penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat bantu. Kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif. Dengan penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas. Meskipun demikian, *electronic government* bukan berarti menggantikan peran aparat pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep *electronic government* masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah atau mengirim surat.

Melalui pengembangan *electronic government*, dilakukan penataan sistem manajemen serta proses kerja dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah



otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktifitas yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah.

Inisiatif *electronic government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Untuk menunjang manfaatnya, *electronic government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.

*Electronic government* dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas mengunduh formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan/pengumpulan formulir secara *online* merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan

*delivery* (pembayaran). Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa *electronic government* bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan sampai dengan tahap *full-electronic delivery service* perlu diupayakan.

Mengenai tujuan *electronic government*, tujuannya adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, dimana dalam hal ini *electronic government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan antara lain:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga- lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *electronic government* perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan- tahapan yang realistis dan terukur.

Dengan adanya keenam strategi ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan strategis *electronic government* yang akan memberi manfaat bagi banyak pihak termasuk memberi bantuan dalam menunjukkan kinerja yang efektif, efisien dan produktif.

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government untuk dapat menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga

elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah *support*, *capacity* dan *value*.

a. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti *trend* atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan lancar. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja dengan model *top down*, maka jelas dukungan implementasi *E-Government* yang efektif harus dimulai dari level tertinggi ke rendah. Namun, lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

1. Disepakatinya kerangka *E-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan.
2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (baik manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan *E-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas,

ditugaskannya lembaga-lembaga khusus sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya).

4. Disosialisasikannya konsep *E-Government* secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

McConel International meletakkan faktor kepemimpinan sebagai salah satu variabel dalam menentukan negara mana saja yang telah siap menerapkan konsep *E-Government*. Maka dari itu pemimpin diharapkan dapat menjadi pendukung (*support*) yang juga memberi fasilitas yang mendukung dalam penerapan *E-Government*.

b. *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan cita-cita *E-Government* menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-Government*.

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan azas manfaat yang diharapkan.

Ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut tidak dapat menjadi alasan tertundanya sebuah pemerintahan untuk menerapkan *E-Government*, karena banyaknya fasilitas dan sumber daya yang berada di luar jangkauan pemerintah masih dapat diupayakan. Pemerintah sudah seharusnya mencari cara yang efektif agar secepat mungkin dapat memenuhi ketiga prasyarat tersebut.

c. *Value*

Kedua elemen sebelumnya merupakan aspek yang dapat dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan diimplementasikannya konsep tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dari adanya *E-Government* sesungguhnya adalah masyarakat dan kalangan yang berkepentingan (*demand side*), bukan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang dirasakan oleh masyarakat secara signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa *support*, *capacity* dan *value* merupakan ketiga elemen penting yang dapat membentuk elemen sukses penerapan *E-Government*.

Dengan memenuhi ketiga elemen ini, pemerintah dapat mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

## 2. Peraturan tentang *E-Government*

Terkait dengan pengembangannya, *electronic government* di setiap instansi harus selaras dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, dinyatakan bahwa *electronic government* ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan.

Dengan ini, dapat kita pahami bahwa adanya kemajuan teknologi *electronic government* dapat membantu dan memudahkan kinerja pemerintah dalam melayani publik. Keberadaan *electronic government* juga harus didampingi dengan adanya aturan dan regulasi yang berlaku sehingga *electronic government* memiliki landasan hukum yang resmi dan dapat berjalan dengan baik dan benar pada proses pengoperasiannya. *Electronic government* juga membutuhkan beberapa penunjang seperti ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia yang mengoperasikannya, perlindungan dan perawatan sistem dan banyak penunjang lainnya. Dengan mengelola *electronic government* sebaik mungkin sesuai aturan, diharapkan manfaat dari *electronic government* dapat terasa optimal bagi seluruh pihak.



#### D. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

##### 1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Schiavo-Campo dan Sundaram dalam Sartono (2006:23) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (*government procurement*) sebagai “*The acquisition of goods, services, and public works in a timely manner that result in best value to the government and the people*”, (Perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat).

Selanjutnya, Schiavo-Campo dan Sundaram dalam Sartono (2006:67) memaparkan adanya karakteristik pengadaan barang/jasa di sektor privat (swasta) yang tidak ada pada pengadaan di sektor pemerintah. Beberapa karakteristik pengadaan barang/jasa pada sektor swasta yang tidak ada di pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintah yaitu:

- a. Tidak terlalu menekankan proses tender kompetitif secara formal, dokumentasi prosedur pengadaan dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi.
- b. Menekankan untuk membeli barang yang memberikan *high value* sepadan dengan harganya, dan menunjuk kontraktor yang akan mampu memberikan kualitas jasa yang tinggi dengan harga yang kompetitif.
- c. Dimensi akuntabilitas yang dituntut lebih ditekankan pada hasil (*result*) dan bukan pada pengadaan itu sendiri.

Dalam pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintah justru berlaku hal yang berbeda, dimana proses dan dokumentasi kegiatan menjadi yang diperhatikan dan

diatur, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan (sesuai dengan Teori Agensi) yang mungkin terjadi. Selain itu, dalam hal pengadaan barang/jasa, biasanya lebih menekankan harga terendah (*lowest cost*) dengan tetap memenuhi kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

Schiavo-Campo dan Sundaram dalam Sartono (2006:47) juga mengemukakan adanya beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

- a. Ekonomis (*Economy*)
- b. Mendorong Kompetisi (*Fostering Competition*)
- c. Substitusi Impor (*Import Substitution*)
- d. Penerapan *Good Governance* (*Practicing Good Governance*)
- e. Melindungi Kepentingan Masyarakat (*Protecting the Interest of Citizens*)
- f. Melindungi Lingkungan (*Protecting Environment*)

Sejalan dengan tujuan yang disampaikan di atas, Jourdain dan Balgobin (2003) dalam Sartono (2006:74) mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip umum pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain:

- a. Transparansi
- b. Ekonomis
- c. Efisiensi dan tepat waktu (*Timelines*)
- d. Keadilan (*Fairness and equity*)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh

Kementrian/Lembaga/SKPD/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Guna mencapai tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa, setiap negara pasti telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai tersebut dalam ketentuan (landasan hukum) pengadaan barang/jasa yang berlaku di negaranya. Masing-masing negara menetapkan tujuan yang bervariasi sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Indonesia mengemukakan bahwa tersapat beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

- a. Meningkatkan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembalikan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan nasional.
- b. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
- d. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

Sejalan dengan tujuan di atas prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mencakup:

a. Efisien

Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Efektif

Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Terbuka dan Bersaing

Berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia pengadaan barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknik administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

e. Adil dan Tidak Diskriminatif

Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

f. Akuntabel

Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun mafaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuann yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dari beberapa ungkapan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa adalah perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti anggaran, peraturan, prinsip dan berbagai aspek penting lainnya, yang kemudian akan menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah, pihak lain yang terkait maupun bagi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengadaan.

2. Barang

Perdagangan tentunya memiliki objek untuk diperdagangkan. Objek tersebut berupa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang memiliki definisi yang beraneka ragam, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Jadi segala sesuatu yang berwujud disebut dengan barang, sedangkan barang dagangan adalah barang yang akan dijual.

Menurut Rocky Marbun (2010) barang adalah benda dalam berbagai bentuk uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan penguasa kuasa pengguna anggaran.

Definisi Barang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (14) adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Dalam Pasal (15) dijelaskan bahwa jasa konstruksi dalam seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa barang adalah suatu benda yang memiliki wujud dan fisik, baik barang baku maupun barang jadi yang dimanfaatkan oleh pengguna barang dan dapat digunakan bahkan diperdagangkan.

### 3. Jasa

Selain barang dagangan pemerintah Kota Batam juga membangun dan memperhatikan secara serius mengenai jasa. Jasa menurut Poewadarmita (2005:575) adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain, baik layanan maupun servis. Jasa juga diartikan oleh Poewadarmita sebagai aktivitas, kemudahan, manfaat dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan dinilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya;

perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis; aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagiannya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

Sedangkan menurut Rocky Marbun (2010:2) Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak lain secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya dapat terikat dan juga tidak terlihat pada suatu produk namun dapat dirasakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terdapat dua jenis jasa, yaitu:

a. Jasa Konsultasi

Adalah jenis layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

b. Jasa lainnya

Adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Maka dapat disimpulkan bahwa jasa adalah aktivitas, perbuatan dengan kemampuan/*skill* yang dapat dilakukan untuk membantu atau melayani orang lain yang akan memberikan nilai dan manfaat bagi pengguna jasa tersebut.



#### 4. *E-Procurement*

Berdasarkan pengertian dari Nico Andrianto (2007: 215) *E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh lelang secara elektronik. Penggunaan *E-Procurement* ini biasanya rancu dengan istilah *E-Auction*. Pada prinsipnya *E-Procurement* mengacu pada sistem, sedangkan *E-Auction* mengacu pada proses. Dalam bukunya, Nico Andrianto (2007: 216) mengungkapkan adanya tiga aplikasi besar yang menjadi dasar dalam *E-Procurement*, yaitu *E-Tendering*, *E-Purchasing*, dan *E-Shopping*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan bahwa *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan.

Pada penjelasan tersebut dikemukakan bahwa *E-Procurement* dijalankan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu menggunakan *E-Tendering* dan *E-Purchasing*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 131 Kementrian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2012. Dan disebutkan pula Kementrian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) mulai menggunakan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

Dapat dilihat dari hal tersebut bahwa pemerintah saat ini dengan serius ingin membangun pola pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan dan lebih baik

dari sebelumnya dengan cenderung mendinstruksikan kepada Kementrian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) untuk dapat menggunakan *E-Procurement* dengan semaksimal mungkin. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi pengadaan
- d. Mendukung proses *monitoring* dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Dalam pengimplementasiannya *E-Procurement* dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di setiap daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari LKPP dengan dikeluarkannya Perka Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa LPSE memiliki tugas memfasilitasi PA/KPA/ULP dalam pengelolaan pelelangan secara elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 106 menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik baik itu dilaksanakan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*, dan lebih jelas lagi, dalam Pasal 109 (3) bahwa *E-Tendering* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

Dari berbagai pemahaman mengenai *E-Procurement*, maka *E-Procurement* dapat diartikan sebagai proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan lelang secara elektronik, mengacu pada sistem, untuk memenuhi suatu tujuan

pengadaan. *E-Procurement* mengacu pada peraturan yang berlaku dan berorientasi pada proses pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan dan lebih baik dari sebelumnya (sistem konvensional).

## 5. Unit LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Terkait dengan visi dan misinya, visi dari LKPP adalah:

*“Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”.*

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 misi, yaitu:

- a. Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien.
- b. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing.
- c. Menjadi lembaga pembaruan yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan.

Terkait dengan tugas dan fungsi dari LKPP, tugas LKPP adalah melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian fungsi LKPP adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai LKPP, maka dapat disimpulkan bahwa LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) adalah lembaga yang memiliki visi, misi, tujuan dan fungsi lembaga, lembaga ini berwenang merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal pemerintah secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

#### 6. Unit LPSE

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I)

untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

Kemudian terdapat aplikasi canggih yang sangat penting berkaitan dengan segala kegiatan LPSE, aplikasi ini bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). SPSE merupakan aplikasi *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *E-Procurement* – LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

- a. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen.
- b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik), maka dapat disimpulkan bahwa, LPSE adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan LKPP, memfasilitasi ULP dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengadaan yang dioperasikan secara



elektronik, dengan bantuan fasilitas seperti aplikasi SPSE. Pemanfaatan LPSE diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efektivitas dan efisiensi proses pengadaan serta mendukung proses *monitoring* dan evaluasi.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005: 21) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun menurut Nazir (1988: 63) metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan dua pengertian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam kalangan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Lain halnya dengan ungkapan dari Bogdan dan

Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4), diungkapkan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Berdasarkan pengertian tentang penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, maka dapat dipahami bahwa melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat memahami suatu peristiwa atau fenomena melalui prosedur penelitian dan dapat menyajikan data-data secara tertulis. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tertulis mengenai penerapan *E-Procurement* pada Unit LPSE Kota Batam dalam pengadaan barang dan jasa sebagai upaya mewujudkan *good governance* di Kota Batam.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian yang menjadi pembatas atas suatu masalah yang diteliti agar tidak meluas dari fokus pembahasan dan agar tidak terjadi kesalahan persepsi ketika mengkaji suatu permasalahan. Selain menggunakan teori, penentuan fokus penulisan ini juga menggunakan fakta empiris. Menurut Moleong (2009: 97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah dan sebagainya. Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penulisan, dengan demikian penulis akan memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti. Berdasarkan isu-isu strategis yang krusial untuk dibahas serta tujuan penulisan, maka fokus dari penulisan ini adalah:

1. Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance* yang meliputi tiga elemen, yaitu:
  - a. *Support* (Berkaitan dengan keterlibatan dari berbagai pihak dan bentuk dukungan yang diberikan dalam penerapan *E-Procurement*)
  - b. *Capacity* (Meliputi sumber daya kapasitas yang dibutuhkan dan yang sudah tersedia di Unit LPSE Kota Batam dalam penerapan *E-Procurement*)
  - c. *Value* (Nilai dan manfaat serta *output* yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan *E-Procurement*)
2. Kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang meliputi:
  - a. Faktor internal
  - b. Faktor Eksternal

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Dijelaskan oleh Moleong (2013: 128) bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan dan atas pertimbangan teori substantif

agar penulis dapat melakukan observasi lapangan dengan tepat sehingga penulis dapat menemukan kesesuaian teori dengan kenyataan di lapangan.

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Batam dengan situs penelitian Unit LPSE Kota Batam. Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasarkan pada pertimbangan penulis, bahwa implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa oleh Unit LPSE Kota Batam begitu menarik untuk dibahas karena merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* cukup berkaitan dan berpengaruh bagi penelitian ini, salah satu contohnya ialah prinsip transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dimana dengan adanya LPSE siapa saja dapat memantau perkembangan serta proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, apakah sudah efektif dan efisien atau belum, keberadaan LPSE juga dapat membantu meminimalisir terjadinya praktek KKN.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tahapan penting dalam proses penulisan, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penulisan skripsi ini dapat berlangsung hingga pada akhirnya penulis mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah ditetapkan (Sarwono, 2006: 123). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

## 1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung diperoleh di tempat penelitian di Unit LPSE Kota Batam. Menurut Sarwono (2006:16) data Primer diperoleh melalui pertanyaan tertulis atau lisan dengan menggunakan metode wawancara terhadap narasumber. Narasumber yang dimaksud antara lain:

- a) Kepala Unit LPSE Kota Batam, yang dijabat oleh Indra Sufian, M. Eng.  
Penulis menentukan Bapak Indra Sufian sebagai informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini karena beliau merupakan salah satu Tim Pengelola yang sudah ada di Unit LPSE Kota Batam sejak Unit ini pertama kali didirikan. Beliau sangat memahami mengenai penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Unit LPSE Kota Batam, oleh karena itu Penulis melakukan wawancara sebanyak 3 kali dengan beliau di Kantor Unit LPSE Kota Batam.
- b) Admin PPE Unit LPSE Kota Batam, yang dijabat oleh Eka Putri Yunita, S.T.  
Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Putri Yunita karena beliau sangat memahami penerapan teknik *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Unit LPSE Kota Batam. Wawancara yang Penulis lakukan dengan beliau dengan beliau sebanyak 4 kali di Kantor Unit LPSE Kota Batam.
- c) Pengguna (*user*) LPSE, yaitu Dra. Diah Sri Purwanti. Ibu Diah merupakan salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang turut menggunakan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penulis mewawancarai sebanyak 1 kali di Kantor Pemerintah Kota Batam.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa data-data yang sudah tersedia dan diperoleh penulis dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan (Sarwono, 2006:210). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya data itu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain. Dalam penulisan ini data sekunder yang digunakan Penulis adalah segala informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, data-data sekunder tersebut terdiri atas:

- a. Literatur terkait fokus penelitian
- b. Peraturan Perundang-Undangan terkait kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah
- c. Dokumen dan arsip dari Unit LPSE Kota Batam
- d. Dokumen dan arsip dari LKPP Indonesia.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting dalam menyusun suatu penulisan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara dan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data di lapangan. Data-data yang diperoleh nantinya akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Proses analisis data yang dilakukan diharapkan mampu memberikan hasil yang valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.



Sugiyono (2015: 309) berpendapat bahwa teknik pengumpulan data dibedakan menjadi empat bagian yaitu observasi, *interview*, dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya (triangulasi). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, relevan, tepat dan akurat dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara berguna untuk mendapatkan data dari sumber utama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Pada tahap ini penulis berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara lebih lanjut dan memperjelas data serta informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan bantuan panduan wawancara (Usman dan Akbar, 2009:52).

Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan beberapa anggota dari Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam. Wawancara ini Penulis lakukan untuk mengetahui beberapa hal yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Unit LPSE Kota Batam.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2015:310) observasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dan kegiatan yang berlangsung di lapangan. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan pengamatan dan pencatatan

sesuai tujuan penelitian dan kebutuhannya, penulis dapat memahami situasi sebenarnya yang berlangsung di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis datang ke kantor Unit LPSE Kota Batam dan mengamati beberapa kegiatan serta menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Unit LPSE Kota Batam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan penulis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 329).

Dalam penelitian ini data berupa dokumen yang dikumpulkan adalah kebijakan, foto, tabel serta berkas yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Unit LPSE Kota Batam.

## **F. Instrumen Penelitian**

Menurut Arikunto (2006:136), instrumen penelitian merupakan alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2015:222), instrumen penelitian adalah alat

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

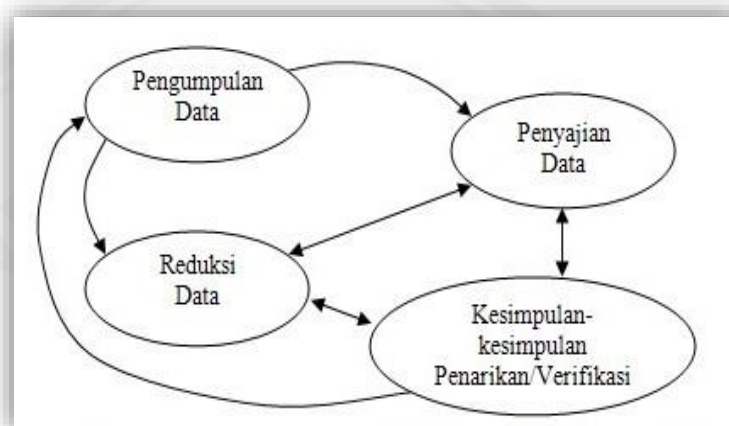
Hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa peralatan penunjang, seperti kamera dan buku catatan untuk mencatat informasi yang diperoleh.

### G. Metode Analisa Data

Penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, mengacu pada model interaktif oleh Miles & Huberman dalam Sugiyono (2014: 334). Adapun komponen-komponen analisis dalam model interaktif digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1: Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Model Interaktif oleh Miles & Huberman**

Sumber: Miles & Huberman dalam Sugiyono (2014:337)

#### 1. Pengumpulan Data

Tahap pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan fokus penelitian.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yang dimaksud dengan mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dan fokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam menyederhanakan, sedangkan data yang tidak diperlukan dapat dihilangkan agar memberikan kemudahan dalam penulisan.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data, dalam bentuk uraian singkat. Dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif. Tahap penyajian data bermaksud untuk memudahkan dalam memahami persoalan yang terjadi, selain itu rencana penulisan selanjutnya dapat tersistematis dengan baik.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahapan akhir ini, penulis menyimpulkan data secara keseluruhan yang telah disajikan setelah direduksi dan di kondensasi berdasarkan kategori-kategori data yang ada. Tujuannya adalah agar penulis dapat menuju pada kesimpulan akhir yang dapat menjadi jawaban atas fokus permasalahan yang dibahas.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Batam

Sebelum membahas seputar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam yang menjadi situs dalam penelitian ini, ada baiknya peneliti memberikan gambaran umum mengenai Kota Batam yang merupakan lokasi dalam penelitian ini. Kota Batam adalah sebuah kota yang terletak di antara pulau-pulau yang berlokasi di Provisinsi Kepulauan Riau. Saat ini Kota Batam telah berumur 188 Tahun, semenjak awal dibentuknya pada 18 Desember 1829. Secara administratif Kota Batam saat ini dipimpin oleh seorang Walikota, yaitu Bapak H. Muhammad Rudi, S. E., M.M. dan didampingi oleh seorang Wakil Walikota, Bapak Amsakar Ahmad, M. Si.



**Gambar 2: Peta Kota Batam**

*Sumber: Pemerintah Kota Batam, 2015.*

a. Visi & Misi

Kota Batam memiliki visi dan misi. Visi Kota Batam adalah: *“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional.”* Adapun misi yang dilakukan oleh Kota Batam untuk mencapai visinya adalah:

1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.



4. Menumbuhkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

b. Geografis dan Iklim

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara: - 0°25' 29" LU - 1°15' 00" LU - 103°34' 35" BT -104°26' 04"BT. Berdasarkan data yang dihimpun dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Kota Batam 2004-2014, luas wilayah Kota Batam 3.990,00 Km<sup>2</sup>, terdiri dari luas wilayah darat 1.040 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 2.950 km.

Secara geografis bagian Utara Kota Batam berbatasan dengan Selat Singapura, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Senayang, bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun, dan bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Utara. Kota Batam terdiri dari 400 pulau, 329 di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara, meliputi 12 Kecamatan dan 64 kelurahan.

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2014 berkisar antara 21,4°C–23,4°C dan suhu maksimum berkisar antara 31,8°C–34,1°C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2014 adalah 26,3°C–28,2°C. Keadaan tekanan udara rata-rata untuk tahun 2014, berkisar antara 1.008,6 MBS–1.012,0 MBS. Sementara kelembaban udara di Kota Batam rata-rata berkisar antara 75%–86%.

c. Kependudukan

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen dan multi etnis, namun, penduduk asli Kota Batam adalah suku Melayu. Kota Batam memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan oleh migrasi penduduk luar daerah ke Kota Batam. Batam dianggap sebagai Kota yang berpotensi untuk menjadi tujuan bagi para perantau dan mencari pekerjaan, hal demikian juga disebabkan oleh faktor geografis Kota Batam yang sangat potensial. Faktor inilah yang membuat karakteristik penduduk Kota Batam menjadi multi etnis.

Suku bangsa masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Beberapa suku yang dominan adalah suku Melayu, Minang, Batak, Makassar, Jawa, Flores, Tionghoa dan lain-lain. Dengan berpayungkan budaya melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Kota Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga Desember 2008, Batam telah berpenduduk kurang lebih 915.882 jiwa dan memiliki laju

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Mayoritas penduduk Kota Batam beragama Islam, Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor walikota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamis. Agama Kristen dan Katholik juga banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak dan Flores. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa digunakan sebagai bahasa sehari-hari, bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti Bahasa Minang, Bahasa Batak, Bahasa Jawa, Bahasa Makassar, dan juga Bahasa Tionghoa serta Bahasa Mandarin. Hal demikian terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu.

## **2. Gambaran Umum Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam**

### **a. Profil Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam**

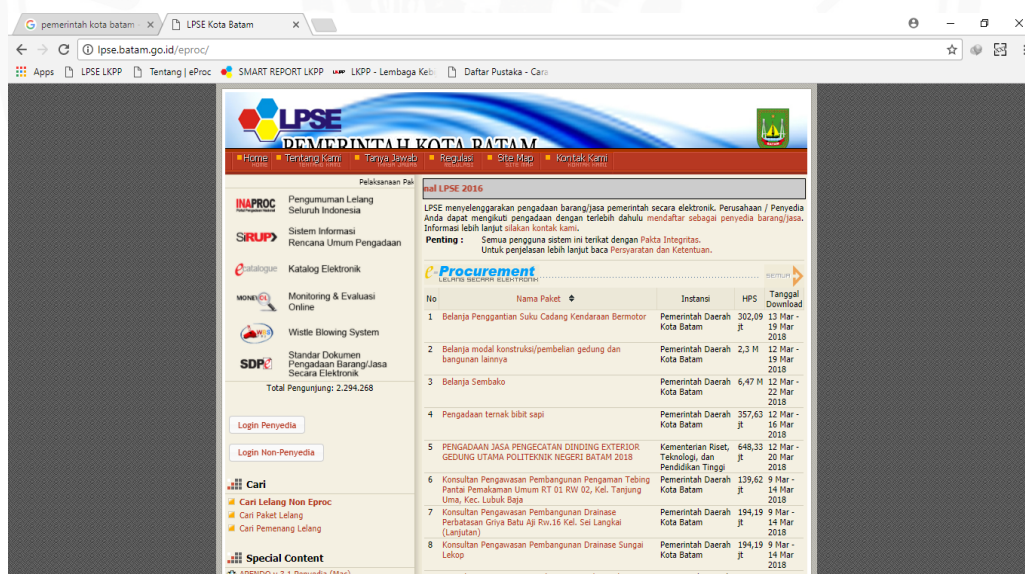
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Adapun pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam hal ini Panitia Kerja (PK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia yang mengikuti proses lelang serta K/L/D/I yang menggunakan SPSE Kota Batam. Pelayanan yang diberikan oleh LPSE berupa *training* bagi pengguna, proses registrasi dan verifikasi bagi pengguna baru serta memfasilitasi hal-hal terkait penggunaan SPSE.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik LPSE juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unit LPSE Kota Batam adalah salah satu unit yang berdiri sejak awal pembentukan LPSE di seluruh Indonesia yakni pada tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, dimana pada saat pembentukannya, LPSE Kota Batam berada di bawah Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Batam. Peralihan tugas pokok, fungsi (tupoksi) serta aturan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian hingga saat ini menempatkan kedudukan LPSE Kota Batam berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam.

Kedudukan LPSE pada Bidang Penyelenggaraan *E-Government* diimplementasikan ke dalam program *E-Procurement*, hal ini merupakan salah satu karakteristik untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Beberapa prinsip tersebut yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi dan efektivitas, mendukung proses *monitoring* dan audit serta memberikan akses informasi yang *real time*. Layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik yang dikelola oleh Unit LPSE Kota Batam dapat diakses melalui *website* resmi Unit LPSE Kota Batam, yaitu <http://lpse.batam.go.id/eproc/>. Gambar di bawah ini adalah tampilan halaman utama *Website* Unit LPSE Kota Batam.



**Gambar 3: Tampilan Halaman Utama *Website* Unit LPSE Kota Batam**

Sumber: <http://lpse.batam.go.id/eproc/>. 2017.

Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak lepas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku

pemangku kebijakan. LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, pengembangan aplikasi yang dikenal sebagai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan produk layanan yang dikembangkan oleh pihak LKPP yang kemudian disempurnakan kebutuhannya bekerja sama dengan LPSE seluruh Indonesia sehingga menciptakan sistem yang transparan dan kredibel. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) saat ini adalah pengadaan secara elektronik yaitu *E-Tendering* dan *E-Purchasing* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*.

Pengelolaan sistem yang merupakan tugas LPSE meliputi:

1. Pengelolaan terhadap aktivitas lalu lintas data elektronik berupa penggunaan aplikasi SPSE, kinerja *server* yang berjalan (*main*) dan cadangan (*backup*), jaringan dan ruang *server*.
2. Pengelolaan data pengguna aplikasi SPSE yaitu proses verifikasi dan registrasi, konsultasi dan kebutuhan data bagi pengguna dan anggota LPSE.

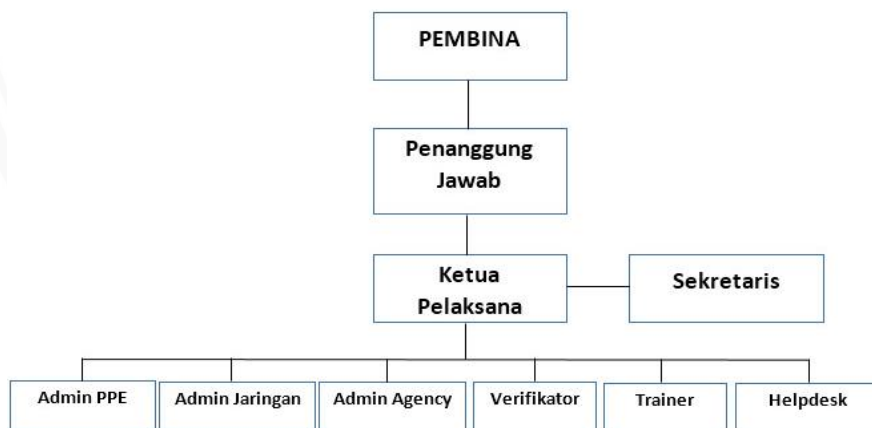


3. Pengelolaan aplikasi SiRUP di daerah yang membantu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penggunaan aplikasi SiRUP.

Rencana strategis pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) LPSE Kota Batam dalam pelaksanaannya adalah untuk memberikan pelayanan pengelolaan sistem, administrasi serta membantu OPD dalam melaksanakan proses pengadaan secara elektronik sehingga tujuan dari prinsip-prinsip *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Batam dapat tercapai.

b. Struktur Organisasi Unit LPSE Kota Batam

Bagan di bawah merupakan Bagan Susunan Tim Pengelola LPSE Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Surat Keterangan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola LPSE Kota Batam. Berikut adalah bagan struktur organisasi Unit LPSE Kota Batam.



**Gambar 4: Struktur Organisasi Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam  
Tahun 2017**

*Sumber: LPSE Kota Batam Tahun 2017*



Tim Pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam mulai dari Ketua Pelaksana, Sekertaris dan jajarannya berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan dan teknis kepada Walikota Batam selaku Pembina. Anggaran pelaksanaan kegiatan LPSE Kota Batam dibebankan kepada belanja Dinas Kominfo Kota Batam menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

c. Tugas dan Fungsi Unit LPSE Kota Batam

Mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), berikut adalah tugas dan fungsi Unit LPSE di seluruh Indonesia, termasuk Unit LPSE Kota Batam.

1. Tugas Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) meliputi:
  - a. Memfasilitasi PA/KPA OPD dalam menggunakan aplikasi SiRUP.
  - b. Melakukan proses verifikasi pengguna baru, perbaikan data serta perubahan yang diperlukan oleh pengguna.
  - c. Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) /Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen serta *agency* dalam penggunaan SPSE.
  - d. Memberikan bantuan konsultasi kepada pengguna jika mempunyai kesulitan dan menghadapi masalah dalam menggunakan SPSE.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah K/L/D/I melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1, fungsi yang diseleggarakan LPSE meliputi:

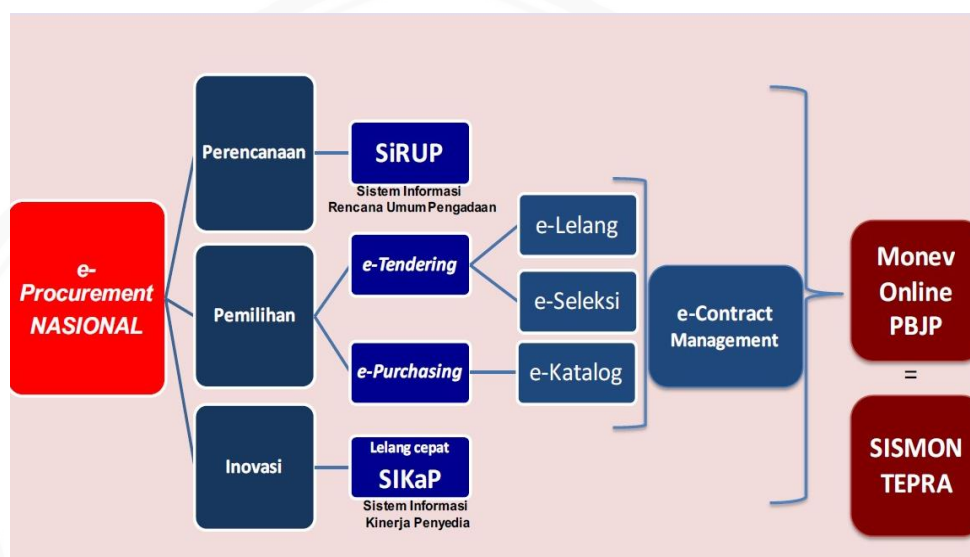
- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya.
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.
- d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Peneliti menyajikan data sesuai fokus yang telah ditentukan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pada penerapan *E-Procurement* dan kendala pada penerapan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- 1. **Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai Upaya Terwujudnya *Good Governance***

Dengan mengacu pada upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*, *E-Procurement* diterapkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam. Proses *E-Procurement* yang terjadi digambarkan pada Sistem *E-Procurement* Nasional yang dikembangkan oleh LKPP di bawah ini.



**Gambar 5: Sistem *E-Procurement* Nasional Dikembangkan oleh LKPP**

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

*E-Procurement* Nasional yang dikembangkan oleh LKPP mengacu pada perencanaan, pemilihan dan inovasi. Pada bagian perencanaan terdapat SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Pada bagian selanjutnya, pemilihan terbagi menjadi dua kegiatan yaitu *E-Tendering* yang di dalamnya terdapat kegiatan *E-Lelang* dan *E-Seleksi*, dan *E-Purchasing* yang di dalamnya terdapat kegiatan *E-Katalog*. Pada pemilihan tujuannya adalah untuk mencapai *E-Contract Management*. Kemudian pada bagian terakhir, inovasi mengacu pada kegiatan

Lelang Cepat SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini baik pada perencanaan, pemilihan dan inovasi pada akhirnya akan di *monitoring* dan evaluasi secara *online* (MONEV Online PBJP) dan dilakukan oleh SISMON TEPRA (Sistem Informasi *Monitoring* Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran).

Terkait dengan penjelasan di atas, penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* dibahas oleh Penulis dan ditinjau dari tiga aspek yang merupakan elemen sukses untuk menerapkan digitalisasi pada sektor publik (*E-Government*), yaitu *support*, *capacity* dan *value*.

**a. *Support***

Mengacu pada buku Indrajit (2002) tentang kajian dari Harvard JFK *School of Government* yang menyatakan bahwa untuk dapat menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik (*E-Government*), terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki, yaitu *support*, *capacity* dan *value*. Elemen yang pertama adalah *support*, Penulis kemudian melakukan wawancara dengan EPY (Perempuan, 34 Tahun) yang merupakan salah satu Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam untuk mengetahui tentang siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana bentuk keterlibatannya (bentuk dukungan yang diberikan) pada penerapan *E-Procurement*

dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance*.

#### 1. Pemerintah Kota Batam

Keterlibatan Pemerintah Kota Batam dalam penerapan *E-Procurement* adalah memberikan dukungan dalam berbagai hal. Hal ini didukung dengan pernyataan berikut dari EPY (Perempuan, 34 Tahun) yang merupakan salah satu Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam.

“Bentuk-bentuk dukungan yang dikasih sama Pemko Batam wujudnya tuh sumber daya kayak fasilitas fisik maupun non fisik. Pemerintah Kota Batam menciptakan regulasi yang pasti ada kaitannya dengan perintah dari pusat. Dari Pemko Batamnya sendiri juga ngasih alokasi dana yang asalnya dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) buat Unit LPSE Kota Batam. Terus ada juga Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam yang emang dibentuk buat mengoperasikan unit tersebut, ini kaitannya langsung dengan LKPP pusat Mbak. Pemerintah Kota Batam juga menunjang kinerja Unit LPSE Kota Batam dengan menyediakan ruangan kerja, komputer dengan perangkatnya, jaringan internet, *server*, meja, kursi, alat tulis kantor (ATK) dan berbagai fasilitas kebutuhan lainnya.” (Senin, 12 Februari 2018. Pukul: 10.05 Kantor Unit LPSE Kota Batam)

Begitulah ungkapan EPY (Perempuan, 36 Tahun) terkait *support* yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam untuk Unit LPSE Kota Batam, yaitu dapat disimpulkan bahwa *support* yang diberikan dapat berupa dukungan fisik maupun non fisik, seperti anggaran, regulasi, fasilitas penunjang dan sebagainya. Adapun bentuk dukungan yang paling signifikan adalah supremasi hukum atau regulasi yang menjadi dasar hukum, aturan dan acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam. Beberapa dasar hukum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
- g) Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Otorisasi Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;

- h) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i) Keputusan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Batam.

Selain Pemerintah Kota Batam, pihak-pihak yang terkait dengan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa sebagai pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam turut serta membantu mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Pihak-pihak terkait juga memiliki bentuk keterlibatannya masing-masing.

## 2. Penyedia

Berdasarkan hasil wawancara dengan ER (Perempuan, 43 Tahun) yang merupakan salah satu Staf Tim Verifikasi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang saat ini menjadi Bidang Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ), beliau menyatakan bahwa: “Keterlibatan sektor swasta pada kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah sebagai penyedia, swasta di sini sangat membantu program pembangunan Pemerintah Kota Batam.” (Kamis, 1 Maret 2018. Pukul: 10.25. Kantor BPBJ Kota Batam.)

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sektor swasta adalah sebagai penyedia yang memberikan dukungan berupa partisipasi dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kerja sama yang terjalin antara Unit LPSE Kota Batam dengan para penyedia menunjukkan bahwa dalam hal ini siapa saja yang ingin menjadi penyedia dapat berpartisipasi dalam membantu



mewujudkan pembangunan di Kota Batam melalui beberapa proses yang telah ditentukan.

### 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

EPY (Perempuan, 34 Tahun) juga menyatakan bahwa pengguna LPSE di lingkungan Pemerintah Kota Batam yakni Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada dimasing-masing OPD serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menaungi Kelompok Kerja (Pokja) yang berada dibawah Sekretariat Kota Batam selaku pengguna. Hal ini disimpulkan atas hasil cuplikan wawancara berikut.

“Kita dari LPSE nggak kerja sendiri Mbak. Ada juga pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batam yakni beberapa OPD yang berkaitan, kayak pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen sama pokja-pokja yang ada. Terus di sini LKPP tentu juga punya keterlibatan penting karena menjadi naungan LPSE se-Indonesia. Ada juga yang namanya TEPRRA Mbak, itu tuh semacam tim evaluasi yang ngawasin realisasi anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dan yang juga terlibat di sini ada masyarakat awam. Masyarakat awam itu adalah orang-orang yang bukan dalam bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, makanya dibilang awam. Tapi mereka ini punya peran juga karena mereka yang ingin tau gimana kegiatan pengadaan berjalan, apa yang dikerjain Pemerintah dan dari rasa ingin taunya masyarakat awam inilah yang memicu pentingnya nilai transparansi. Masyarakat awam punya hak untuk tau gimana transparansi kegiatan Pemerintah. Jadi kita menyajikan transparansi itu juga sebenarnya balik lagi buat masyarakat, bisa dibilang ini salah satu bentuk partisipasi masyarakat Mbak karena kepeduliannya terhadap Pemerintah.” (Senin, 12 Februari 2018. Pukul: 10.05. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

### 4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berperan sebagai penanggung jawab pusat yang menaungi seluruh Unit LPSE di Indonesia. Berbagai peraturan yang dibuat oleh LKPP menjadi acuan bagi seluruh Unit LPSE

yang ada di Indonesia. Hal ini didasari atas hasil wawancara di atas dengan EPY (Perempuan, 34 Tahun).

5. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dengan EPY (Perempuan, 34 Tahun), terdapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dikelola oleh masing-masing OPD dibawah asistensi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Batam. TERPA dibentuk untuk mengevaluasi dan mengawasi realisasi anggaran baik kinerja fisik maupun keuangan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di setiap OPD.

6. Masyarakat Awam

Masyarakat awam tidak secara langsung banyak terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesuai dengan kutipan wawancara di atas yang Penulis lakukan dengan EPY (Perempuan, 34 Tahun) selaku Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam, masyarakat awam yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang secara umum kurang memiliki pengetahuan luas tentang *E-Procurement* namun sesungguhnya masyarakat awamlah yang akan merasakan manfaat dari suatu pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah. Masyarakat awam berhak untuk mengetahui pembangunan apa yang tengah direncanakan dan sedang berjalan, maka dari itu masyarakat membutuhkan transparansi atas kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat dilihat melalui situs LPSE Kota Batam (<http://lpse.batam.go.id/eproc/>) dan SiRUP Nasional (<https://sirup.lkpp.go.id/sirup>)

**b. Capacity**

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Indrajit (2002), hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* mengungkapkan bahwa *capacity* (kapasitas) merupakan elemen kedua yang perlu dimiliki untuk sukses menerapkan *E-Government*. *Capacity* maksudnya adalah unsur kemampuan atau keberdayaan dari Pemerintah setempat dalam mewujudkan cita-cita *E-Government*.

Kapasitas sumber daya yang dibutuhkan pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya terwujudnya *good governance* dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti fasilitas dan kemajuan teknologi. Berkenaan dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM), SDM yang dibutuhkan oleh Unit LPSE Kota Batam adalah sebuah tim yang dibentuk untuk mengelola Unit LPSE Kota Batam. Hal ini didasari oleh pernyataan dari IS (Laki-laki, 46 Tahun). Berikut adalah kutipan wawancara Penulis dengan IS selaku Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini mengenai sumber daya kapasitas yang dibutuhkan dan sudah dimiliki oleh Unit LPSE Kota Batam.

“Jadi untuk mengoperasikan Unit LPSE Kota Batam ini kita butuh beberapa sumber daya, Mbak Dinar. Kalo sumber daya manusia itu tugasnya melayani kegiatan pengadaan secara elektronik. Makanya dibentuk tim pengelola LPSE yang jumlahnya 14 orang termasuk saya di dalamnya. Pembentukan tim pengelola juga ada dasarnya Mbak, nanti Mbak bisa cek regulasi yang muaranya dari LKPP terkait LPSE dan Keputusan Walikota Batam juga ada. Yang pasti sih di LPSE Batam ini kita butuh; kepala unit, sekretaris, unit administrasi elektronik, unit registrasi dan verifikasi sama unit layanan dan dukungan. Dari situ nanti ada pembagiannya lagi Mbak Dinar bisa cek struktur organisasi kita karena di situ Mbak Dinar pun bisa liat dan belajar

apa saja kewajiban kita dalam melayani *user*.” (Senin, 26 Februari 2018. Pukul: 08.45. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

Dari hasil wawancara di atas, dinyatakan bahwa setiap anggota dalam Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Untuk dapat memahami lebih jelas mengenai tugas masing-masing aktor, berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE Pasal 6 mengenai Perangkat Organisasi, penjabarannya adalah sebagai berikut.

1. Kepala
2. Sekretaris
3. Unit Administrasi Elektronik
4. Unit Registrasi dan Verifikasi
5. Unit Layanan dan Dukungan

Melanjutkan aturan di atas tentang kebutuhan SDM suatu Unit LPSE, dalam pembentukannya Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam diklasifikasikan menjadi beberapa jabatan. Berikut adalah klasifikasi dan tugas-tugas Tim Pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam.

1. Kepala/Ketua Unit, bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara keseluruhan.
2. Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (Admin PPE), mengoperasikan dan memantau aplikasi sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

3. Admin Jaringan, menyiapkan dan memelihara infrastruktur jaringan LPSE serta *server* LPSE.
4. Admin *agency*, melakukan *entry* data identitas *agency*, pengelolaan paket/anggaran, pegawai, panitia pengadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal.
5. Verifikator, melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
6. *Trainer*, melakukan pelatihan/*training* kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Lelang, Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan secara *online*.
7. *Help Desk*, bertugas menyediakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bagi Penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik.

Terlepas dari kapasitas sumber daya yang dibutuhkan oleh Unit LPSE Kota Batam, tabel berikut menjelaskan ketersediaan tim pengelola yang ada pada Unit LPSE Kota Batam.

**Tabel 4: Susunan Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam Tahun 2017**

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	OPD
<b>I</b>	<b>PEMBINA</b>		
1	Walikota Batam	Pembina	
<b>II</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>		
1	Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam	Penanggungjawab	
<b>III</b>	<b>PELAKSANA</b>		
1	Indra Sufian, M. Eng.	Ketua	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
2	Eki Suzano, M. Si	Sekretaris	Bagian Administrasi Pembangunan
3	Raja Andhi Nugraha, S. T.	Admin PPE	Bappeda Kota Batam
4	Eka Putri Yunita, S. T.	Admin PPE	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
5	Irpan Syarif HSB, S. Kom.	Admin PPE	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
6	Irpa Darajat, S. T.	Admin Jaringan	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
7	Eko Burianto, S. E.	Admin Agency	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
8	Dian, S. S.T.P.	Admin Agency	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
9	Ijon Suardi	Verivikator	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
10	Munasir	Verivikator	Bagian Pengadaan Barang & Jasa
11	Budi Jatmika, S. Sos.	Verivikator	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
12	Dodi Hamdani, S. Kom.	Trainer	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam
13	Kholidin, S. T.	Trainer	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertamanan
14	Syaiful Bahari, A. Md.	Help Desk	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Batam

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas merupakan struktur organisasi Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam pada Tahun 2017. Ketika Penulis menanyakan tentang seperti apa SDM yang dibutuhkan untuk dapat bergabung dalam Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan IS (Laki-laki, 46 Tahun) yang merupakan Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam, diungkapkan oleh beliau bahwa:

“Siapa aja yang emang berkompeten punya kesempatan buat jadi Tim Pengelola LPSE di sini Mbak, ya cuma ada beberapa penilaian supaya bisa dipilih. Dia harus punya kemampuan yang kalo biasa dinilai dari *capability* dan pengalaman individu itu, terus dia harus punya kemauan yang biasanya saya nilai tuh dari keperibadiannya si individu ini (*personality*). Sejauh ini orang-orang kantor udah cukup kooperatif kok Mbak Dinar walopun terpisah ke dalem beberapa OPD, kinerjanya tetep baik. Sekarang ini kita punya 14 orang di tim, LPSE Batam. terus ada 15 *Agency*, kurang lebih 1.500 penyedia dama PPK/Panitia/Pokja itu ada kurang lebih 200 orang. Kita juga butuh beberapa sumber daya lain selain SDM tentunya. Sumber daya lain itu contohnya ya kayak penunjang, ruangan kerja, anggaran, perlengkapan,



*server, bidding room* sama komputernya, banyak Mbak. Asal kebutuhan sama fasilitas disediakan Insya'allah kita operasikan dengan amanah biar ada manfaatnya.” (Selasa, 13 Februari 2018. Pukul 11.17. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang memenuhi kualifikasi berkesempatan menjadi Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam. Selama kebutuhan akan berbagai sumber daya dipenuhi maka Unit LPSE Kota Batam akan berupaya menjalankan tugasnya dengan amanah. Menurut Kepala Unit LPSE Kota Batam, hingga saat ini Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam sudah cukup kooperatif dalam menunjukkan performa kinerjanya. Bila ditulis dalam angka, kapasitas sumber daya yang ada pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya terwujudnya *good governance* adalah sebagai berikut.

1. Tim Pengelola : 14 Orang
2. *Agency* : ± 15 Orang
3. Penyedia : ± 1.500 Penyedia
4. PPK/Panitia/Pokja : ± 200 Orang

Selain kebutuhan kapasitas sumber daya manusia, kebutuhan lain Unit LPSE Kota Batam dapat berupa; anggaran, ruangan kerja layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), *bidding room*, koneksi internet, perangkat keras (*hardware*) seperti seperangkat komputer, *server*, perangkat lunak (*software*) seperti sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan lain-lain. Berikut adalah beberapa sumber daya yang merupakan penunjang pada Unit LPSE Kota Batam.





**Gambar 6: Kantor Unit LPSE Kota Batam**

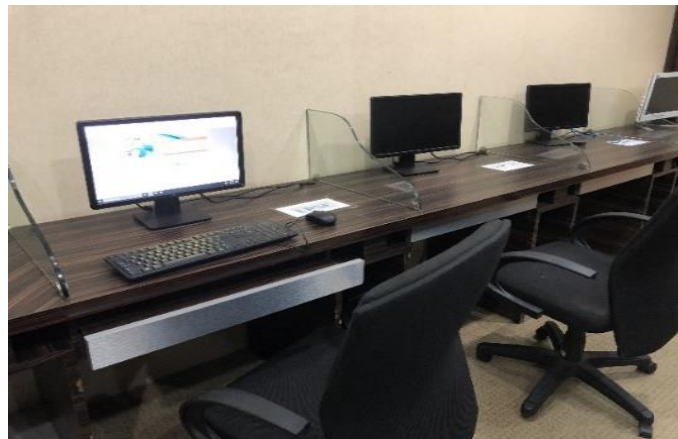
*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

Gambar 6 di atas merupakan dokumentasi Kantor Unit LPSE Kota Batam yang Penulis ambil pada saat mengunjungi Kantor Unit LPSE Kota Batam dan berlokasi di dalam kantor Pemerintah Kota Batam. Sedangkan Gambar 7 di bawah ini adalah dokumentasi untuk ruangan kerja yang ada di Unit LPSE Kota Batam.



**Gambar 7: Ruangan Kerja Unit LPSE Kota Batam**

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*



**Gambar 8: *Bidding Room* dan *Computer Bidding* Unit LPSE Kota Batam**

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

Gambar 8 merupakan dokumentasi untuk *Bidding Room* dan *Computer Bidding* yang disediakan bagi para *user* yang berada di Unit LPSE Kota Batam. Gambar 9 di bawah ini adalah dokumentasi untuk *server* yang dimiliki oleh Unit LPSE Kota Batam.



**Gambar 9: *Server* Unit LPSE Kota Batam**

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

c. *Value*

Mengacu pada buku yang ditulis oleh Indrajit (2002) elemen yang terakhir adalah *value* (nilai/manfaat). Kedua elemen sebelumnya merupakan aspek yang dapat dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Pengimplementasian *E-Government* pada berbagai aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah diharapkan mampu memberikan nilai/manfaat seperti informasi yang bersifat transparan kepada masyarakat sehingga penerapan konsep *E-Government* yang berbasis sistem informasi manajemen dapat langsung dirasakan manfaatnya dalam pelaksanaan Pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan IS (Laki-laki, 46 Tahun) dan EPY (Perempuan, 34 Tahun) selaku Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam, terkait dengan elemen yang terakhir yaitu *value*, Penulis bertanya mengenai sejauh mana keberhasilan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dan sejauh mana program *E-Procurement* ini telah memberikan manfaat bagi beberapa pihak, khususnya dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

“Kalo bicara soal penerapan *E-Procurement* ini sih jelas ada manfaatnya ya Mbak soalnya kan jadi lebih transparan, layanan dan sistem elektroni gini juga meminimalisir KKN kan tujuannya. Terus jadi lebih efektif dan efisien, mengupayakan *paperless* dan gak konvensional lagi tapi digital. Kalo dari transparansinya orang-orang bisa tau progress pengadaan gimana, udah gitu bisa juga Mbak liat dari berapa banyak penyedia ato badan usaha yang sudah terverifikasi di LPSE Batam ini, terus dari rekapan realisasi anggaran. Tabel yang Mbak liat itu nunjukin gimana progres LPSE, baik itu meningkat atopun menurun yang pasti ada target yang berusaha kita capai di sini. Sejauh ini penerapan *E-Procurement* di sini bisa dibilang berhasil karena kitanya juga uda lama berdiri, cuma harus terus dioptimalkan lagi. Kalo Mbak tau ada 17 Standarisasi LPSE yang harus dipenuhi. Saat udah tercapai semua berarti

sukses penerapan *E-Proc*-nya dan jelas ada manfaatnya.”(Rabu, 14 Februari 2018. Pukul 11.17. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam telah memenuhi elemen *value* yaitu nilai/manfaat bagi pihak-pihak terkait. Kutipan wawancara diatas disertai dengan adanya tabel-tabel rekapitulasi di bawah ini yang memuat; data badan usaha (penyedia) yang terverifikasi mulai dari Tahun 2011 hingga akhir Agustus Tahun 2017; tabel *Agency* yang terdaftar dan menggunakan (memanfaatkan) fasilitas SPSE Kota Batam; serta tabel nilai pagu yang dikelola. Tabel-tabel tersebut merupakan data penunjang yang menunjukkan perkembangan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Berikut adalah rekapitulasi data yang dikelola oleh Unit LPSE Kota Batam.

1. Bentuk Badan Usaha yang Dikelola Tahun 2011 – Agustus 2017

**Tabel 5: Bentuk Badan Usaha yang Dikelola 2011 – Agustus 2017**

No	Bentuk Usaha	Jumlah Terverifikasi
1.	CV	5.054
2.	Perseroan Terbatas	4.236
3.	Usaha Dagang	20
4.	Koperasi	15
5.	Firma	26
6.	Perusahaan Perseorangan	24
7.	Konsultan Perseorangan	41
8.	Perusahaan Dagang	9
	Total	9.425

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas menunjukkan jumlah badan usaha yang terverifikasi oleh Unit LPSE Kota Batam. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa

badan usaha terverifikasi yang paling tinggi adalah CV dengan jumlah 5.054 Badan terverifikasi dan badan usaha terverifikasi yang paling rendah adalah Perusahaan Dagang dengan jumlah hanya 9 Badan terverifikasi.

## 2. Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency

**Tabel 6: Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2013**

No.	Nama Agency	Jumlah Paket (Lelang)	Total Pagu (Rp)	Total HPS (Rp)
1	Komisi Pemilihan Umum	1	397.740.250,00	287.738.960,00
2	Perwakilan BPK-RI Prov. Kepri	3	2.467.723.000,00	1.692.055.122,00
3	Yayasan Putra Batam	1	815.000.000,00	808.751.100,00
4	Pemerintah Kota Batam	381	343.773.572.042,00	326.621.783.462,00
5	BTKL PP Kelas I Batam	2	1.953.352.000,00	1.952.950.000,00
6	Kantor Pertahanan Kota Batam	3	779.389.000,00	778.389.000,00
7	Politeknik Negeri Batam	5	75.978.000.000,00	75.795.984.098,00
8	Pengadilan Agama Kelas I B Batam	3	2.396.250.000,00	2.296.177.000,00
9	Kantor Pelabuhan Batam	1	328.750.000,00	325.600.000,00
10	LPP RRI Batam	1	1.286.774.000,00	1.268.560.000,00
11	Yayasan Komputer Batam	2	1.000.000.000,00	999.920.570,00
	Jumlah	403	431.176.550.292,00	412.945.909.312,00

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas menunjukkan jumlah Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2013 yang dikelola oleh Unit LPSE Kota Batam. Agency merupakan lembaga/non lembaga/instansi Pemerintah yang menggunakan jasa (fasilitas) LPSE untuk melakukan suatu pengadaan barang/jasa melalui SPSE, namun sumber dana dan Pokjanya berasal dari Agency sendiri.

Pagu adalah nilai yang tertera pada survey harga barang (SHB) yang ditentukan oleh Pemerintah untuk dijadikan acuan bagi para penyedia yang mengikuti lelang, SHB biasanya dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. HPS ialah Harga Perkiraan Sendiri yang merupakan harga barang tersebut pada saat paket pekerjaan akan dilakukan. Harga penawaran tidak boleh melebihi



pagu atau paling tidak sama dengan HPS. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah paket lelang tertinggi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 381 Paket Lelang, dan jumlah pagu mencapai Rp 343.773.572.042,00 serta jumlah HPS sebesar Rp 326.621.783.462,00.

**Tabel 7: Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2014**

No.	Nama Agency	Jumlah Paket (Lelang)	Total Pagu (Rp)	Total HPS (Rp)
1	Komisi Pemilihan Umum	1	781.520.000,00	341.891.000,00
2	BNN Kepri	1	450.000.000,00	448.511.000,00
3	Perwakilan BPK-RI Prov. Kepri	1	771.206.000,00	771.206.000,00
4	Kantor Pertahanan Kota Batam	1	793.080.000,00	793.054.000,00
5	Politeknik Negeri Batam	4	13.739.463.000,00	13.719.471.244,00
6	Universitas Putra Batam	1	848.100.000,00	848.100.000,00
7	Pemerintah Kota Batam	493	602.570.966.069,48	595.444.043.923,47
	Jumlah	502	619.954.335.069,48	612.399277.167,47

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas menunjukkan jumlah Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2014 yang dikelola oleh Unit LPSE Kota Batam. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah paket lelang tertinggi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 493 Paket Lelang, dan jumlah pagu mencapai Rp 602.570.966.069,48 serta jumlah HPS sebesar Rp 595.444.043.923,47.

**Tabel 8: Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2015**

No.	Nama Agency	Jumlah Paket (Lelang)	Total Pagu (Rp)	Total HPS (Rp)
1	Komisi Pemilihan Umum	2	2.216.409.000,00	1.356.034.760,00
2	BNN Kepri	1	351.512.000,00	314.305.000,00
3	Pemerintah Kota Batam	607	525.863.228.826,95	508.632.676.375,31
4	Politeknik Negeri Batam	5	103.448.769.000,00	103.020.150.000,00
	Jumlah	615	631.879.918.826,95	613.323.166.135,32

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas menunjukkan jumlah Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2015 yang dikelola oleh Unit LPSE Kota Batam. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah paket lelang tertinggi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 607 Paket Lelang, dan jumlah pagu mencapai Rp 525.863.228.826,95, serta jumlah HPS sebesar Rp 508.632.676.375,31.

**Tabel 9: Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2016**

No.	Nama Agency	Jumlah Paket (Lelang)	Total Pagu (Rp)	Total HPS (Rp)
1	Perwakilan BPK-RI Prov. Kepri	1	1.073.555.000,00	843.202.742,00
2	Pemerintah Kota Batam	344	349.614.469.170,00	339.978.642.331,90
3	Universitas Putra Batam	52	34.274.721.750,00	33.765.002.150,00
4	Politeknik Negeri Batam	2	5.221.654.000,00	5.221.654.000,00
	Jumlah	399	390.184.399.920,90	379.808.501.223,00

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas menunjukkan jumlah Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2015 yang dikelola oleh Unit LPSE Kota Batam. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah paket lelang tertinggi



dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 344 Paket Lelang, dan jumlah pagu mencapai Rp 349.614.469.170,00, serta jumlah HPS sebesar Rp 339.978.642.331,90.

**Tabel 10: Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2017**

No.	Nama Agency	Jumlah Paket (Lelang)	Total Pagu (Rp)	Total HPS (Rp)
1	Pemerintah Kota Batam	539	1.131.927.384.360,00	733.369.411.376,18
	Jumlah	539	1.131.927.384.360,00	733.369.411.376,18

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

Tabel di atas menunjukkan jumlah Rekapitulasi Realisasi Lelang per Agency Tahun 2015 yang dikelola oleh Unit LPSE Kota Batam. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah paket lelang tertinggi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 539 Paket Lelang, dan jumlah pagu mencapai Rp 1.131.927.384.360,00, serta jumlah HPS sebesar Rp 733.369.411.376,18.

## 3. Jumlah Lelang Berdasarkan Kategori

**Tabel 11: Rekapitulasi Lelang Berdasarkan Kategori Tahun 2013 - 2017**

No.	Kategori Lelang	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		Lelang Selesai	Dalam Proses	Total	Lelang Selesai	Dalam Proses	Total	Lelang Selesai	Dalam Proses	Total	Lelang Selesai	Dalam Proses	Total	Lelang Selesai	Dalam Proses	Total
1	Pengadaan Barang	83	3	86	72	0	72	100	0	100	30	0	30	33	4	37
2	Jasa Lainnya	20	0	20	24	0	24	45	0	45	31	0	31	37	0	37
3	Pekerjaan Konstruksi	158	3	161	215	1	216	256	1	257	170	1	170	236	2	238
4	Jasa Konsultasi dan Badan Usaha	134	2	136	190	0	190	122	0	122	167	0	168	216	11	227
5	Jasa Konsultasi Perseorangan	0	0	0	0	0	0	91	0	91	0	0	0	0	0	0
	Total	395	8	403	501	1	502	614	1	65	398	1	399	522	17	539

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas menunjukkan jumlah lelang berdasarkan kategori yang dikelola oleh Unit LPSE Kota Batam selama lima tahun terakhir, mulai Tahun 2013 hingga Tahun 2017. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah lelang berdasarkan kategori setiap tahunnya mengalami dinamika yang menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Perkembangan jumlah ini menunjukkan bahwa total lelang tertinggi adalah sebesar 539 Lelang yang terjadi pada tahun 2017 dengan keterangan 522 Lelang selesai dan 17 Lelang yang masih dalam proses.

Pengguna (*user*) yang dapat memanfaatkan layanan LPSE dalam bentuk sistem SPSE adalah pihak penyedia, organisasi/*agency* yang terdaftar di SPSE Kota Batam serta masyarakat awam. Adapun bentuk informasi dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan antara lain:

a) Informasi

Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna seperti paket pengadaan yang terdaftar di LPSE Kota Batam, data *monitoring* dan evaluasi Pemerintah Kota Batam serta data/informasi terkecuali yang membutuhkan permohonan tersendiri dan sesuai aturan yang berlaku.

b) Fasilitas

Penggunaan komputer di ruangan *bidding* dimana fasilitas *computer bidding* terdapat 4 Unit yang terakses langsung ke jaringan lokal SPSE sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses *website* LPSE Kota Batam. Hal ini juga membantu jika pengguna mengalami masalah konektivitas untuk dapat mengakses *website* LPSE.

## c) Layanan

Para pengguna SPSE dapat mengirimkan *email* atau langsung datang ke LPSE guna mendapatkan layanan seperti *training*, verifikasi, konsultasi atau mencari solusi bila menemui permasalahan dalam menggunakan SPSE. Selain itu, pengguna SiRUP (K/L/D/I di lingkungan Pemerintah Kota Batam) juga bisa mendapatkan layanan *training* maupun konsultasi.

Keberhasilan penerapan sistem *E-Procurement* (SPSE) di Unit LPSE Kota Batam juga dapat dilihat dari *output* yang dihasilkan. *Output* yang dimaksudkan adalah mengenai performa kinerja/hasil yang ditunjukkan. Dari sisi ini kita dapat memperhatikan peningkatan pada proses pengelolaannya. Keberadaan LPSE diharapkan mampu untuk mengelola dan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta sistem informasi lain yang menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola LPSE Kota Batam. Hal ini tentu saja tidak lepas dari perubahan dan peningkatan yang ada pada aplikasi SPSE, SiRUP maupun aplikasi terkait lainnya yang bersinergi dengan data dan informasi yang ada pada aplikasi tersebut. Berikut adalah tabel-tabel yang menunjukkan perkembangan *output* Unit LPSE Kota Batam.

**Tabel 12: Perbandingan Verivikasi Penyedia Baru Tahun 2016 – 2017**

No.	Output	2016		2017 (per September)	
		Target	Hasil	Target	Hasil
1	Penyedia Baru	250	243	250	237

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

Tabel di atas menunjukkan perbandingan verivikasi penyedia baru pada Tahun 2016 dan Tahun 2017. Target yang hendak dicapai oleh LPSE sebesar 250

penyedia pada Tahun 2016, namun yang terverifikasi hanya 243 penyedia. Berbeda dengan Tahun 2017, target penyedia yang hendak dicapai masih 250 penyedia, namun pada Tahun 2017 penyedia yang terverifikasi justru menurun menjadi 237 penyedia.

**Tabel 13: Perbandingan Penanganan/Konsultasi Masalah LPSE Tahun 2016 – 2017**

No.	Output	2016		2017 (per September)	
		Target	Hasil	Target	Hasil
1	Melalui <i>e-mail</i>	30	12	30	20
2	Melalui tatap muka	50	38	50	35

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

Tabel di atas menunjukkan perbandingan penanganan/konsultasi masalah LPSE yang terjadi pada Tahun 2016 dan Tahun 2017. Konsultasi untuk menangani masalah LPSE dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui *e-mail* dan melalui tatap muka secara langsung. LPSE menargetkan 30 kegiatan konsultasi melalui *e-mail* dan 50 kegiatan konsultasi melalui tatap muka pada Tahun 2016, namun hasil yang dicapai adalah sebesar 12 kegiatan konsultasi melalui *e-mail* dan 38 kegiatan konsultasi melalui tatap muka. Pada Tahun 2017 LPSE masih menargetkan 30 kegiatan konsultasi melalui *e-mail* dan 50 kegiatan konsultasi melalui tatap muka, namun hasil pencapaian pada Tahun 2017 menunjukkan adanya 20 kegiatan konsultasi melalui *e-mail* dan 35 kegiatan konsultasi melalui tatap muka.

**Tabel 14: Perbandingan Penggunaan *Computer Bidding* Tahun 2016 – 2017**

No.	Output	2016		2017 (per September)	
		Target	Hasil	Target	Hasil
1	Penggunaan <i>computer bidding</i>	10	8	10	13

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas menunjukkan perbandingan penggunaan *computer bidding* pada Tahun 2016 dan Tahun 2017. Target yang hendak dicapai oleh LPSE sebesar 10 penggunaan *computer bidding* pada Tahun 2016, namun yang tercatat yaitu 8 penggunaan *computer bidding*. Berbeda halnya dengan Tahun 2017, target penggunaan *computer bidding* sebesar 10 penggunaan dan hasil yang dicapai sebesar 13 penggunaan. Hasil pencapaian pada Tahun 2016 memang tidak sesuai target, namun pada Tahun 2017 hasil yang dicapai justru melampaui target.

**Tabel 15: Perbandingan *Training* Pengguna Tahun 2016 – 2017**

No.	Output	2016		2017 (per September)	
		Target	Hasil	Target	Hasil
1	<i>Training</i> pengguna	10	3	10	5

Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.

Tabel di atas menunjukkan perbandingan *training* pengguna pada Tahun 2016 dan Tahun 2017. Tahun 2016 target yang hendak dicapai oleh LPSE sebesar 10 *training* pengguna, namun yang tercatat hanya 3 *training* pengguna. Pada Tahun 2017 terjadi peningkatan, target yang ditetapkan masih sebesar 10 *training* pengguna dan hasil yang dicapai sebesar 5 *training* pengguna. Hasil pencapaian pada Tahun 2016 dan 2017 memang tidak sesuai target, namun hasil yang dicapai

dalam dua tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan *training* pengguna di Unit LPSE Kota Batam.

**Tabel 16: Perbandingan Konsultasi/Pendaftaran SiRUP Tahun 2016 – 2017**

No.	Output	2016		2017 (per September)	
		Target	Hasil	Target	Hasil
1	Konsultasi/ Pendaftaran SiRUP	32	10	45	45

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

Tabel di atas menunjukkan perbandingan konsultasi/pendaftaran SiRUP pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Unit LPSE Kota Batam. Tahun 2016 target yang hendak dicapai oleh LPSE sebesar 32 konsultasi/pendaftaran, namun yang tercatat hanya 10 konsultasi/pendaftaran. Pada Tahun 2017 target ditingkatkan menjadi 45 konsultasi/pendaftaran dan hasil yang dicapai sesuai target yaitu tercatat 45 konsultasi/pendaftaran. Hasil pencapaian pada Tahun 2016 dan 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kegiatan konsultasi/pendaftaran SiRUP di Unit LPSE Kota Batam.

**Tabel 17: Perbandingan *Training* SiRUP Tahun 2016 – 2017**

No.	Output	2016		2017 (per September)	
		Target	Hasil	Target	Hasil
1	<i>Training</i> SiRUP	32	8	45	20

*Sumber: LPSE Kota Batam, 2017.*

Tabel di atas menunjukkan perbandingan *training* SiRUP yang tercatat pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Unit LPSE Kota Batam. Tahun 2016 target yang hendak dicapai oleh LPSE sebesar 32 *training* SiRUP, namun yang tercatat hanya 8 *training* SiRUP. Pada Tahun 2017 target ditingkatkan menjadi 45 *training* SiRUP



dan hasil yang dicapai meningkat dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target yaitu 20 *training* SiRUP. Walaupun tidak mencapai target, hasil pencapaian yang terjadi pada Tahun 2016 dan 2017 menunjukkan adanya peningkatan hasil pencapaian dalam kegiatan *training* SiRUP di Unit LPSE Kota Batam.

Berdasarkan beberapa tabel di atas, kita dapat melihat adanya perbandingan pada tahun 2016 dengan tahun 2017 pada *output-output* tersebut. Performa kinerja yang ditunjukkan oleh Unit LPSE Kota Batam mengalami dinamika yang ada kalanya menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Target yang telah ditetapkan dan hendak dicapai pada beberapa *output* dapat tercapai dan ada pula yang tidak tercapai. Hal ini merupakan isu penting bagi Unit LPSE Kota Batam, dengan adanya tabel komparasi *output* ini, Unit LPSE Kota Batam dapat mengevaluasi Unit untuk terus memberikan performa kinerja yang terbaik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, karena pada dasarnya hal ini merupakan tolak ukur keberhasilan penerapan sistem *E-Procurement* pada Unit LPSE Kota Batam dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

Pada penerapannya, IS (Laki-laki, 46 Tahun) selaku Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam, *E-Procurement* telah memberikan manfaat yang besar dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Beberapa manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *E-Procurement* telah mewujudkan efektivitas dan efisiensi yang merupakan salah satu prinsip *good governance*. Hal ini dapat dilihat dari segi waktu,

proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh para *user* yang menggunakan layanan pengadaan secara elektronik.

2. Kedua, proses *E-Procurement* membuat kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah menjadi lebih ekonomis/hemat, hal ini tampak dari upaya *paperless* yang dapat meminimalisir berbagai penggunaan kertas untuk formulir, iklan, pemberkasan administratif dan berbagai penggunaan benda fisik konvensional lainnya yang dialihkan menjadi elektronik.
3. Ketiga, prinsip *good governance* yang dapat diwujudkan dari penerapan *E-Procurement* adalah prinsip transparansi. Hal ini terpantau jelas melalui SPSE khususnya proses pengadaan secara elektronik baik *E-Tendering* maupun *E-Purchasing*, serta pelaksanaannya dapat dilihat oleh masyarakat.
4. Keempat, proses *E-Procurement* di negara ini telah menciptakan supremasi hukum dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Diperlukan konsistensi dan aturan yang kuat untuk menjadi dasar hukum atas suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Dalam hal ini LPSE juga mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh LKPP RI.
5. Kelima, akuntabilitas para aparatur sipil negara (ASN) juga dapat menjadi bukti bahwa para aparatur sipil negara (ASN) telah menunjukkan kinerja yang dengan teradministrasi dengan baik dan benar serta berkompeten dalam proses penerapan *E-Procurement* pada kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Penjelasan *value* di atas didasari oleh hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan IS (Laki-laki, 46 Tahun) selaku salah satu Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam. Berikut adalah cuplikan wawancara tersebut.

“*E-Procurement* ini kan asalnya pengembangan dari *E-Government* yah. Tentu digitalisasi yang dilakukan sama Pemerintah itu ada tujuan ayng baik buat banyak pihak asal nggak disalah gunain. Penting kita jaga keamanannya karena sistem ini kan bermanfaat banget buat banyak pihak. Manfaat dari penerapan *E-Procurement* ini banyak Mbak Dinar. Yang pertama dan paling penting tuh jelas ningkatin efektivitas dan efisiensi karena semua jadi lebih mudah, ekonomis juga ga pake-pake kertas lagi ya diminimalisir lah. Terus orang jadi kudu belajar teknologi kan kalo mau ikut make ginian, inilah salah satu contoh pengalihan dari yang konvensional ke digital. Terus lebih transparan buat siapa aja bisa tau informasi pengadaan tapi yang boleh diketahui aja Mbak yang kita transparankan, karena Pemerintah juga tetep harus menjaga beberapa privasi yang sifatnya rahasia Negara. Terus kita dituntut untuk mengadministrasikan segala pekerjaan dengan baik jadi itu yang para ASN harus akuntabel. Dan yang pasti kegiatan pengadaan dan apa aja yang berhubungan dengan LPSE gak mungkin berjalan gitu aja tanpa adanya regulasi yang jelas. Jadi kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Batam dan dimanapun itu menciptakan supremasi hukum. Adanya dasar dan ketegasan dari Pemerintah ini ngasih manfaat buat para penggunaanya biar pada punya acuan yang jelas.” (Senin, 5 Maret 2018, Pukul 09.35 di Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

Ketegasan IS (Laki-laki, 46 Tahun) dalam menjelaskan manfaat dari Unit LPSE Kota Batam membuat Penulis memahami bahwa penerapan *E-Procurement* telah berhasil memberikan *value* (nilai/manfaat) bagi para penggunaanya. Adapun Standardisasi LPSE 2014 menurut LKPP yang menjadi acuan bagi setiap Unit LPSE di Indonesia untuk terus memberikan *value* dalam proses pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Standar Kebijakan Layanan
2. Standar Pengorganisasian Layanan
3. Standar Pengelolaan Aset Layanan

4. Standar Pengelolaan Risiko Layanan
5. Standar Pengelolaan Layanan *Helpdesk*
6. Standar Pengelolaan Perubahan
7. Standar Pengelolaan Kapasitas
8. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
9. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat
10. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan
11. Standar Pengelolaan Keamanan *Server* dan Jaringan
12. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan
13. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan
14. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan
15. Standar Pengelolaan Hubungan Dengan Pengguna Layanan
16. Standar Pengelolaan Kepatuhan
17. Standar Penilaian Internal

Hingga saat ini Unit LPSE Kota Batam telah mencapai 9 standar dari 17 standar yang merupakan standar sertifikasi *E-Procurement* sesuai ketentuan dari LKPP. Terkait hal tersebut, IS (Laki-laki, 46 Tahun) mengatakan bahwa:

“Sekarang ini LPSE Kota Batam sudah mencapai 9 sertifikasi dari 17 yang ada. Pada pelaksanaannya Unit LPSE Kota Batam harus terus menunjukkan peningkatan ya pastinya karena pencapaian Unit LPSE Kota Batam juga terus meningkat disesuaikan sama kebutuhan dan peraturan yang berlaku Mbak. Ini ada dampaknya ke sistem aplikasi juga. Pencapaian itu sesuai target apa engga ya tergantung gimana kuatnya komitmen pimpinan daerah dan itu dipengaruhi juga sama situasi politik yang ujungnya mempengaruhi perhatian Pemerintah terhadap LPSE.” (Senin, 5 Maret 2018. Pukul 09.48.)

Perhatian yang diberikan kepada LPSE seperti pendampingan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ke daerah adalah untuk memberdayakan ULP dan LPSE serta peran serta aktif OPD dalam pelaksanaan proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Dari sisi ini dapat dilihat adanya *support* dari Pemerintah pusat maupun daerah serta melalui LKPP. IS juga menambahkan bahwa, “LPSE adalah wadah dalam menerapkan sistem *E-Procurement* yang muaranya untuk mewujudkan *good governance*, terutama berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi.” (Senin, 5 Maret 2018. Pukul 10.02.)

## **2. Kendala yang Dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam Menerapkan *E-Procurement* sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance***

Dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam. Penulis meninjau kendala tersebut dari dua faktor, yaitu faktor internal, faktor yang menyebabkan kendala berasal dari dalam Unit LPSE Kota Batam itu sendiri dan faktor eksternal, yaitu faktor yang menyebabkan kendala dari luar Unit LPSE Kota Batam. Setelah melakukan wawancara dengan IS (Laki-laki, 46 Tahun) selaku Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam, berikut adalah kutipan wawancara yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *good governance*.

“Kebanyakan orang mungkin udah terbiasa pake sistem lama yang konvensional, tapi semenjak ada *E-gov* banyak perubahan yang diupayakan serba digital termasuk di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Perubahan ini gak semata-mata ngikutin globalisasi Mbak. Banyak manfaatnya tapi pasti ada kendalanya juga. Kalo ditinjau dari faktor internal yang pertama soal status, sekarang kita masih *ad hoc*, Tapi kita lagi upayakan untuk menjadi lembaga struktural jadi personil fokus ke LPSE *tok*. Terus masalah lain itu terkait anggaran, sejauh ini udah cukup tapi masih belum bisa mengakomodir kebutuhan operasional secara maksimal, kayak buat sosialisasi/pelatihan pengguna SPSE versi terbaru. Kendala lain juga ada di sosialisasi, kadang orang belum terbiasa dan masi kesulitan ngelengkapin berkas, bingung sama sistem pengadaan elektronik yang disediakan, makanya kita adain fasilitas *training*, di sini keliatan kalo perkembangan teknologi itu jadi tuntutan. Terus kendala lain paling ya soal pembagian kerja sama fasilitas penunjang buat Unit LPSE Kota Batam sendiri.” (Senin, 5 Maret 2018. Pukul 11.20. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

**a. Faktor Internal**

**1. Status**

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam saat ini LPSE Kota Batam masih berstatus *ad hoc*, dan belum merupakan lembaga struktural, dengan kata lain masih menyatu dengan satuan unit kerja lain, yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Batam. Status *ad hoc* ini tengah diupayakan menjadi lembaga struktural agar Unit LPSE Kota Batam dapat berdiri secara independen.

**2. Anggaran**

Kutipan wawancara di atas menjadi dasar pernyataan bahwa anggaran belanja Unit LPSE Kota Batam yang dibebankan pada Dinas Kominfo Kota Batam masih



belum mampu mengakomodir kebutuhan operasional secara maksimal, khususnya untuk pelaksanaan sosialisasi/pelatihan kepada pengguna SPSE yang menerapkan versi terbaru serta aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) bagi penyedia.

### 3. Sosialisasi

Pemutakhiran data dan aplikasi SPSE tidak selalu berjalan mulus dalam pembaharuannya, terkadang masih ditemukan beberapa gangguan. Rekan-rekan OPD yang berhubungan dengan Unit LPSE Kota Batam dalam pengelolaan LPSE juga membutuhkan pelatihan penggunaan dan penyebaran informasi terkait pemberlakuan versi baru SPSE. Guna memberikan informasi yang tepat dan benar, maka dirasa perlu untuk diadakan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Hal ini dasari oleh kutipan hasil wawancara di atas.

### 4. Perkembangan Teknologi Menjadi Tuntutan

Mengacu pada kutipan hasil wawancara di atas, semakin berkembangnya aplikasi yang ada tentu saja membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keahlian baru terhadap aplikasi yang digunakan bagi sumber daya manusia yang ada di Unit LPSE Kota Batam.

### 5. Pembagian Kerja

Aplikasi SiRUP yang menjadi tanggung jawab Admin PPE selaku admin daerah membuat beban kerja Admin PPE bertambah, sehingga diperlukan tambahan personil Admin PPE, hal ini di dasari oleh kutipan wawancara di atas.



## 6. Penunjang

Ketersediaan fasilitas penunjang untuk pelayanan LPSE merupakan salah satu faktor pendukung agar terlaksananya pelayanan yang prima. Berdasarkan hasil wawancara di atas, keberadaan ruangan pelayanan Unit LPSE Kota Batam yang menyediakan fasilitas komputer, kecepatan jaringan yang cepat dan nyaman sudah sesuai dengan SOP yang ada, hanya saja keberadaan *bidding room* yang menyatu dengan ruangan *Media Center* Pemerintah Kota Batam membuat ruang gerak pengguna menjadi kurang nyaman.

Performa kinerja *server* yang stabil merupakan salah satu hal krusial dalam pengaplikasian SPSE. Bertambahnya data yang meningkatkan beban kerja *server* berkenaan dengan kapasitas *server* yang menyebabkan perlunya peningkatan performa mesin dan alat pendukung lainnya agar dapat bekerja secara maksimal.

### b. Faktor Eksternal

#### 1. Tidak Konsistennya Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan IS (Laki-laki, 46 Tahun) selaku Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam, secara umum, yang masih menjadi kendala dalam penerapan *E-Procurement* pada kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah masih adanya peraturan yang tidak konsisten. Berikut kutipan wawancara yang mendukung pernyataan tersebut.

“Kalo dari faktor eksternal kan berarti di luar LPSE Kota Batam. Ada peraturan yang nggak konsisten Mbak. Contohnya ya, ada dua aturan yang berbeda dan membingungkan. Contoh peraturannya kayak Peraturan Kepala

LKPP yang nyaranin Unit LPSE nggak digabungkan sama Unit Pengadaan. Beda lagi sama peraturannya Kementrian Dalam Negeri yang nyaranin untuk ngegabung Unit LPSE sama Unit Pengadaan biar prosesnya lebih efektif dan efisien. Nah kan ini bingung ya, jadi harusnya sih bisa lebih konsisten jadi nggak ada kerancuan buat penerapannya, *toh* semua tujuannya juga pasti biar bermanfaat.” (Senin, 5 Maret 2018. Pukul 11.35. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kedua aturan ini bila diterapkan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada kenyataannya terdapat beberapa Unit LPSE yang mengikuti aturan dari LKPP dan adapula yang mengikuti peraturan dari Kementrian Dalam Negeri. Kedua peraturan ini perlu diperhatikan kembali agar tidak menimbulkan kerancuan dan masalah baru. Terlepas dari persoalan konsistensi peraturan, semua kembali pada pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

## 2. Sosialisasi

Kendala lain yang berasal dari luar Unit LPSE Kota Batam adalah sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh EPY (Perempuan, 34 Tahun) selaku Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam. Beliau mengatakan bahwa:

“Dari pihak LPSE emang ngadain *training* buat *user*, khawatir masih ada yang punya masalah dalam mengoperasikan SPSE, punya pertanyaan atau apapun itu keluhannya kami usahakan untuk fasilitasi. *Training* ini juga bentuk dari sosialisasi. Kadang dari awal sudah ada yang beranggapan ini sistem baru ribet sulit dan sebagainya, banyak faktor sih, kadang ada juga yang masih belum melengkapi berkas, ada keuslitan *upload*, belum bisa ngoperasiin versi SPSE yang baru. Hal itu wajar, makanya kita ada dan melayani, kita terus bimbing dan arahkan kalo dibutuhkan.” (Senin, 12 Februari 2018. Pukul 11.35. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

Pihak LPSE telah menyediakan *trainer* bagi para *user* yang membutuhkan arahan dan informasi terkait dengan SPSE. Kendala dalam hal ini ialah berbagai layanan pada SPSE terkadang masih sulit dipahami oleh *user*, masih banyak *user*

yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SPSE. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi yang sejak awal sudah dianggap sulit.

Hal serupa juga turut disampaikan oleh salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan *user* LPSE, yaitu DSP (Perempuan, 48 Tahun). DSP mengatakan bahwa:

“Dulu waktu sistem konvensional pasti ketemu langsung dan dijelaskan langsung, tapi karena semua sekarang dialihkan ke basis elektronik kita sebagai *user* awalnya bingung karena belum paham betul. Terus kita dikasih pelatihan sosialisasi supaya ngerti sistem baru ini. Persyaratan yang dibutuhkan juga udah cukup jelas sebenarnya, tapi kadang kita banyak yang masih bingung, kadang nggak tau gimana cara ngoperasiin sistem ini pas lagi bermasalah, apalagi kalo ada *update* versi baru. Yang kayak gini ini jadi kadang jadi kendala buat kita, para *user* SPSE. Tapi kalo ada yang ngajarin dan ngarahin itu bagus banget, kita sangat terbantu.” (Rabu, 28 Februari 2018. Pukul 09.00)

Kutipan wawancara di atas merupakan informasi yang Penulis peroleh dari salah satu *user* yang merupakan PPK dalam kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Unit LPSE Kota Batam. DSP mengutarakan hal tersebut dan membuat Penulis memahami bahwa dengan adanya sosialisasi *training* bagi para *user* dapat mengatasi kendala para *user* yang membutuhkan bimbingan dan arahan dari pihak LPSE.

### 3. Koordinasi dengan OPD

Di lain kesempatan Penulis telah mewawancarai EPY (Perempuan, 34 Tahun) yang merupakan salah satu Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam. EPY menjelaskan tentang pentingnya koordinasi yang baik antara unit-unit pelaksana pengadaan barang/jasa Pemerintah. Berikut kutipan wawacara Penulis dengan EPY.

“Pengguna SPSE kayak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan (PP) maupun Kelompok Kerja (Pokja) harus menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik Mbak, karena ini ada kaitannya sama pelaksanaan pengadaan. Kadang kan sangat mungkin terjadi *misskomunikasi*, yang kayak gitu itu biasanya jadi kendala jadi harus dihindari biar lancar kerjaan kita. Soalnya satu unit pasti saling berkaitan dengan yang lain, jadi semua pihak yang terkait udah jelas punya pemahaman tentang pengadaan dan di sini semua harus kerja sama dan berkoordinasi sebaik mungkin.” (Senin, 12 Februari 2018. Pukul 11.46. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

EPY juga menjelaskan bahwa pada prosesnya PPK atau PP selaku pihak yang mempunyai paket pengadaan berkoordinasi dengan Pokja selaku pihak yang akan melakukan proses pengadaan, serta kedudukan LPSE selaku pemberi fasilitas perlu menjalin kerja sama yang baik, sehingga koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pengadaan dapat tercapai dengan maksimal tanpa adanya kendala selama proses berlangsung.

#### 4. Penunjang

“Kendala lain yang juga penting kalo dari luar LPSE tuh kayak kebutuhan daya sama koneksi. Kita butuh daya listrik sama koneksi soalnya perangkat-perangkat yang kita operasiin ini mayoritas butuh listrik dan koneksi, jadi kalo gak ada listrik, gak ada koneksi otomatis sistem gak bisa di akses. Saat ini semua penunjang yang kita butuhin udah tersedia kok dari Pemko. Kalo pas kita tau ada perbaikan jaringan pasti kita infoin dulu. Cuma kendalanya tuh waktu gangguan itu datengnya mendadak jadi itu diluar kemampuan kita dan secara tiba-tiba, setelah aktif lagi pasti kita akan langsung ngasih info kalo tadi ada gangguan khawatir ada pihak yang ngerasa dirugiin.” (Senin, 12 Februari 2018. Pukul 11.55. Kantor Unit LPSE Kota Batam.)

Kutipan di atas ialah hasil wawancara Penulis dengan EPY (Perempuan, 34

Tahun) yang merupakan salah satu Admin PPE di Unit LPSE Kota Batam. Beliau menjelaskan bahwa salah satu penunjang yang sangat penting adalah ketersediaan daya listrik dan koneksi. Daya listrik dan koneksi berguna untuk mengakses SPSE dan harus selalu *stand by* sebagai *support*. Yang menjadi kendala adalah pada saat daya listrik mati, otomatis koneksi ke sistem dapat terputus dan tidak dapat diakses.

Data yang ada tetap tersimpan pada *server* namun dan kegiatan pengadaan yang tengah beroperasi tidak dapat ter-*backup* oleh sistem karena ketiadaan daya listrik dan koneksi yang terputus. Dalam kendala ini, yang dapat dilakukan adalah menyiapkan daya listrik cadangan untuk menjaga sistem selalu *stand by* demi keamanan dan kestabilan kinerja, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

### C. Analisa dan Interpretasi Data

#### 1. Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai Upaya Terwujudnya *Good Governance*

##### a. *Support*

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah Penulis lakukan terkait dengan 3 elemen sukses penerapan *E-Government* yang menjadi fokus dalam penelitian ini, Penulis telah menganalisa beberapa hal dan menyimpulkan kesesuaian teori dengan fakta yang ada di lapangan.

Pada BAB II telah diungkapkan bahwa elemen pertama adalah *support* yang berkaitan dengan dukungan dari Pemerintah/yang berwenang memimpin. Pada Unit LPSE Kota Batam sudah tampak adanya *political will* dari pihak-pihak yang mendukung, seperti Pemerintah yang hakikatnya bersifat *top-down* ke jajarannya hingga Unit LPSE Kota Batam, dalam hal ini terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dukungan-dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam dan jajarannya telah membantu penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Walaupun belum secara sempurna dalam pemberian *support* namun demikian dukungan yang ada sangat memberikan manfaat. Beberapa contoh dukungan yang diberikan ialah:

1. Pemerintah Kota Batam

Keterlibatan Pemerintah Kota Batam dalam penerapan *E-Procurement* adalah memberikan dukungan dalam berbagai hal, seperti menyediakan sumber daya fasilitas fisik maupun non fisik. Pemerintah Kota Batam mengalokasikan dana Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) untuk Unit LPSE Kota Batam. Kemudian dibentuk pula Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam untuk mengoperasikan unit tersebut dan berhubungan langsung dengan LKPP. Pemerintah Kota Batam juga menunjang kinerja Unit LPSE Kota Batam dengan menyediakan ruangan kerja, komputer beserta perangkatnya, jaringan internet, *server*, meja, kursi, alat tulis kantor (ATK) dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan lainnya. Terlepas dari dukungan-dukungan tersebut, bentuk dukungan yang paling signifikan adalah regulasi yang menjadi dasar hukum, aturan dan acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam.

Namun demikian, pada penyajian data telah diungkapkan bahwa terdapat adanya beberapa kendala pada elemen *support*. Salah satunya konsistensi hukum, hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan. Hukum



yang menjadi dasar dalam hal ini seharusnya dipertegas dan bisa menjadi acuan bagi pelaksana hukum tersebut agar tidak menimbulkan kendala baru.

Selain Pemerintah Kota Batam, pihak-pihak yang terkait dengan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa sebagai pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam turut serta membantu mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Pihak-pihak tersebut juga memiliki bentuk keterlibatannya masing-masing.

## 2. Penyedia

Keberadaan sektor swasta berperan sebagai penyedia barang/jasa bagi Pemerintah yang turut membantu program pembangunan Pemerintah Kota Batam. Berdasarkan informasi yang Penulis sajikan, para penyedia harus mendaftarkan diri sesuai prosedur untuk dapat menjadi penyedia yang terdaftar dan mengikuti kegiatan *E-Procurement*.

## 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pengguna (*user*) LPSE di lingkungan Pemerintah Kota Batam yakni Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada dimasing-masing OPD serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menaungi Kelompok Kerja (Pokja) yang berada dibawah Sekretariat Kota Batam selaku pengguna. OPD-OPD yang ada memberikan *support* dengan menjalin koordinasi yang baik dalam bekerja sama dengan Unit LPSE Kota Batam.



4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal ini berperan sebagai penanggung jawab pusat yang menaungi seluruh Unit LPSE di Indonesia. Beberapa regulasi terkait kegiatan pengadaan juga mayoritas berasal dari LKPP, maka LKPP dianggap kiblat bagi seluruh LPSE Nasional.

5. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dikelola oleh masing-masing OPD dibawah asistensi Bagian Adminintrrasi Pembangunan Sekretariat Kota Batam dibentuk untuk mengevaluasi dan mengawasi realisasi anggaran baik kinerja fisik maupun keuangan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di setiap OPD yang ada. Tim ini harus netral dalam mengaawasi dan mengevaluasi realisasi anggaran, serta perlu dipastikan individu di dalam tim ini tidak memiliki kepentingan khusus dalam menjalankan tugasnya. Karena dalam hal ini TEPRA membantu aktualisasi pencegahan praktek KKN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

6. Masyarakat Awam

Masyarakat awam memiliki hak untuk mengetahui pembangunan apa yang tengah direncanakan oleh Pemerintah dan apa pembangunan yang sedang dijalankan. Dengan ini, masyarakat membutuhkan transparansi atas kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, sejauh ini transparansi yang dimaksudkan dapat dilihat melalui situs LPSE Kota Batam (<http://lpse.batam.go.id/eproc/>) dan SiRUP Nasional (<https://sirup.lkpp.go.id/sirup>) serta beberapa situs terkait.

Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, Unit LPSE Kota Batam telah memenuhi keempat syarat penting elemen *support* yang merupakan kunci sukses penerapan *E-Government*. Hal tersebut dijabarkan oleh penjelasan berikut.

1. Pada Unit LPSE Kota Batam pengimplementasian *E-Government* telah menjadi prioritas karena dianggap sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya.
2. Pemerintah Kota Batam juga mengalokasikan sejumlah sumber daya (baik manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep *E-Government* sehingga *good governance* dapat tercapai.
3. Demi keberhasilan konsep yang ingin diimplementasikan, Pemerintah Kota Batam telah menyediakan fasilitas penunjang berupa infrastruktur dan berbagai fasilitas pendukung agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan *E-Government* (seperti adanya supremasi hukum, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya).
4. Konsep *E-Government* telah disosialisasikan secara kontinyu dan menyeluruh kepada kalangan birokrat dan masyarakat.

Dengan ini, Penulis menganalisa bahwa Pemerintah Kota Batam telah mendukung penerapan *E-Procurement* yang merupakan bagian dari *E-Government* terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance*.

Tidak hanya Pemerintah, pihak-pihak terkait seperti swasta selaku penyedia beserta OPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Batam juga terlibat dan memberikan *support* dalam berbagai bentuk. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang memberikan *support* dalam penerapan *E-Procurement* ini agar lebih mengoptimalkan segala upayanya dan melakukan perbaikan-perbaikan serta inovasi baru demi perkembangan yang lebih baik pada sektor pengadaan.

Terkait dengan elemen *support* yang merupakan fokus dalam penelitian ini, beberapa prinsip *good governance* menurut United Nation Development Program (UNDP) yang dikutip dari buku terbitan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000: 23) yang telah diterapkan di Unit LPSE Kota Batam adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi

Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam telah mewujudkan salah satu prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, karena sesungguhnya setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

b) Kepastian Hukum (*Rule of Law*)

Aturan hukum dan perundangan-undangan dibuat secara adil untuk dipatuhi karena menjadi acuan bagi seluruh warga negara. Penerapan *E-Procurement*

dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam telah memiliki kepastian hukum yang kuat, hal ini membuktikan bahwa salah satu prinsip *good governance* telah diwujudkan oleh Unit LPSE Kota Batam.

c) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang Baik (*good governance*) akan bertindak sebagai mediator dalam berbagai kepentingan dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. Unit LPSE Kota Batam telah mewujudkan salah satu prinsip *good governance* ini, yaitu berorientasi konsensus, dalam hal ini menjadi fasilitator yang melayani proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.

d) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pemerintah Kota Batam beserta Unit LPSE Kota Batam telah memiliki perspektif yang luas dan berjangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan yang berkelanjutan, dalam hal ini terkait pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*).

**b. Capacity**

Sehubungan dengan elemen *capacity*, Unit LPSE Kota Batam yang menerapkan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai upaya mewujudkan *good governance* secara keseluruhan telah berupaya

memperhatikan tiga hal penting. Ketiga hal tersebut berkenaan dengan *capacity* yang harus dimiliki oleh Pemerintah, yaitu sebagai berikut.

1. Ketersediaan sumber daya yang ada pada Unit LPSE Kota Batam sudah cukup memadai untuk menerapkan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial. Meskipun demikian, akan lebih baik apabila sumber daya finansial yang dicurahkan bagi Unit LPSE Kota Batam lebih menjadi perhatian lagi karena masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi dengan sempurna.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki oleh Unit LPSE Kota Batam sudah memadai karena fasilitas ini merupakan salah satu faktor internal yang mendukung keberhasilan penerapan *E-Procurement*. Namun, terdapat beberapa fasilitas infrastruktur yang perlu diperhatikan kembali agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
3. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Unit LPSE Kota Batam sudah cukup memadai karena Unit LPSE Kota Batam memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan mumpuni sehingga penerapan *E-Procurement* dapat memberikan *value* (nilai/manfaat) yang diharapkan. Tetapi, akan lebih baik apabila SDM yang ada pada Unit LPSE Kota Batam mendapatkan pembagian tugas dengan lebih adil dan ditata kembali secara struktural agar beban kerja setiap SDM semakin jelas.

Ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang ada pada Unit LPSE Kota Batam sudah cukup memadai dan sesuai kebutuhan serta standar yang telah

ditetapkan. Hanya saja, dengan memperhatikan beberapa kekurangan kebutuhan yang belum terpenuhi Unit LPSE Kota Batam dapat saja memberikan kinerja yang lebih unggul. Dengan disediakannya sumber daya bagi Unit LPSE Kota Batam, diharapkan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Elemen *capacity* yang merupakan salah satu fokus dalam penelitian ini, bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang hendak diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut United Nation Development Program (UNDP) yang dikutip dari buku terbitan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000: 23), Unit LPSE Kota Batam telah mewujudkan beberapa prinsip berikut.

1. Tanggung Jawab (*Responsiveness*). Keselarasan antara program kerja Pemerintah dengan kegiatan pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adanya standar dan pencapaian kinerja yang sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan bagi Tim Pengelola Unit LPSE Kota Batam telah menunjukkan bahwa Unit LPSE Kota Batam telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Akuntabilitas. Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam telah mewujudkan salah satu prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas.

Berbagai proses yang berjalan telah teradministrasi dengan baik di Unit LPSE Kota Batam.

**c. Value**

Elemen *value* yang merupakan fokus dalam penelitian ini, bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut United Nation Development Program (UNDP) yang dikutip dari buku terbitan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000: 23), dapat memberikan nilai/manfaat tertentu. *Value* yang diberikan dari diterapkannya *E-Procurement* oleh Unit LPSE Kota Batam dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai upaya mewujudkan *good governance* adalah yaitu sebagai berikut.

1. **Transparansi.** Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yang sangat penting dan telah diwujudkan oleh Unit LPSE Kota Batam dalam penerapan *E-Procurement* terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Transparansi dapat menunjukkan adanya keterbukaan informasi bagi seluruh pihak yang membutuhkannya. Segala informasi yang dapat diakses secara bebas harus disediakan dengan memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.
2. **Berkeadilan (*Equity*).** Keadilan merupakan salah satu prinsip *good governance* yang turut diwujudkan oleh Unit LPSE Kota Batam. Siapa saja



yang berkepentingan berhak mendapatkan pelayanan pada penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam, karena Pemerintah memberikan kesempatan yang sama rata bagi seluruh masyarakat.

3. Efektivitas dan Efisiensi. Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam telah membuktikan bahwa efektivitas dan efisiensi yang merupakan salah satu prinsip *good governance* dapat diwujudkan. Berbagai proses dan kegiatan pengadaan secara elektronik diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik baiknya dengan sumber daya yang tersedia.

## **2. Kendala yang Dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam Menerapkan *E-Procurement* sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance***

### **a. Faktor Internal**

Setelah meninjau secara internal terkait faktor penyebab kendala yang dihadapi oleh Unit LPSE Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *good governance*, Penulis mendapati beberapa faktor yang berasal dari dalam Unit LPSE Kota Batam. Beberapa faktor internal tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Status

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam saat ini masih berstatus *ad hoc* dan menyatu dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Batam. Status *ad hoc* ini sedang diupayakan untuk menjadi lembaga struktural agar Unit LPSE Kota Batam dapat berdiri secara independen. Dengan dijadikannya Unit LPSE Kota Batam sebagai lembaga yang independen maka perhatian setiap personilnya menjadi lebih fokus ke Unit LPSE Kota Batam.

### 2. Anggaran

Anggaran belanja Unit LPSE Kota Batam yang dibebankan pada Dinas Kominfo Kota Batam masih belum mampu mengakomodir kebutuhan operasional secara maksimal, khususnya untuk kegiatan sosialisasi/*training* dalam menerapkan versi terbaru kepada pengguna serta aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) bagi penyedia. Berbagai anggaran yang diperuntukkan bagi LPSE semestinya dimaksimalkan kembali agar pelayanan yang diberikan optimal.

### 3. Sosialisasi

Pemutakhiran data dan aplikasi SPSE terkadang masih mengalami beberapa kendala, seperti dalam pelatihan penggunaan dan penyebaran informasi terkait pemberlakuan versi baru SPSE. Guna memberikan informasi yang tepat dan benar, maka dirasa perlu untuk diadakan sosialisasi yang optimal kepada seluruh pihak yang terkait agar tidak terjadi kesalahan.

#### 4. Perkembangan Teknologi Menjadi Tuntutan

Perkembangan aplikasi yang ada membutuhkan peningkatan pada bidang keilmuan dan *skill*, khususnya pada berbagai teknologi terkait sistem yang digunakan oleh Unit LPSE Kota Batam. Bila direspon dengan positif, tuntutan ini justru akan menjadi motivasi dalam memotivasi tim yang ada, karena sesungguhnya perkembangan teknologi mampu memberikan manfaat positif.

#### 5. Pembagian Kerja

Admin PPE memerlukan personil tambahan karena dengan Aplikasi SiRUP yang menjadi tanggung jawab Admin PPE selaku admin daerah membuat beban kerja Admin PPE bertambah. Tugas Admin PPE cukup membuat seorang Admin PPE mengemban tanggung jawab yang besar, karena Admin PPE harus dijabat oleh seorang personil tim yang amanah yang tanggap dalam menghadapi setiap beban kerjanya.

#### 6. Penunjang

Salah satu faktor pendukung agar pelayanan prima dapat terlaksana, diperlukan ketersediaan fasilitas penunjang bagi Unit LPSE Kota Batam. Keberadaan ruangan pelayanan Unit LPSE Kota Batam yang menyediakan fasilitas komputer, kecepatan jaringan yang cepat dan nyaman sudah sesuai dengan SOP yang ada, hanya saja keberadaan *bidding room* yang menyatu dengan ruangan Media Center Pemerintah Kota Batam membuat ruang gerak pengguna menjadi kurang nyaman.

Performa kinerja *server* yang stabil juga merupakan salah satu hal krusial dalam pengaplikasian SPSE. Bertambahnya data yang meningkatkan beban kerja *server* berkenaan dengan kapasitas *server*, sehingga dalam hal ini diperlukan peningkatan performa mesin dan alat pendukung lainnya agar dapat alat penunjang yang ada dapat dioperasikan secara maksimal oleh Unit LPSE Kota Batam.

#### **b. Faktor Eksternal**

Bila ditinjau secara eksternal terkait faktor penyebab kendala yang dihadapi oleh Unit LPSE Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *good governance*, Penulis mendapati beberapa faktor yang menyebabkan kendala dan berasal dari luar Unit LPSE Kota Batam. Beberapa faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut.

##### **1. Tidak Konsistennya Peraturan**

Secara umum, yang masih menjadi kendala dalam penerapan *E-Procurement* pada kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah masih adanya peraturan yang tidak konsisten. Beberapa peraturan yang tidak konsisten ini perlu diperhatikan kembali agar tidak membingungkan dan menimbulkan kerancuan. Terlepas mengenai konsistensi peraturan, semua kembali pada pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

## 2. Sosialisasi

Kendala kedua adalah sosialisasi, salah satu bentuk sosialisasi yang dimaksudkan yaitu *training*. Pihak LPSE mengadakan *training* untuk siapa saja pengguna SPSE termasuk *user* dan rekan-rekan OPD Unit LPSE Kota Batam. Terkadang beberapa *user* yang belum terbiasa dan memahami sistem beranggapan sistem yang ada sulit dioperasikan, beberapa *user* juga terkadang masih belum melengkapi berkas sesuai ketentuan. Kendati demikian, adanya beberapa kendala yang berasal dari luar Unit LPSE Kota Batam dihadapi dengan cara memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan mengadakan sosialisasi serta *training* dan terus membimbing serta mengarahkan para *user* sesuai kebutuhan.

## 3. Koordinasi dengan OPD

Unit-unit pelaksana pengadaan barang/jasa Pemerintah sudah seharusnya menjalin koordinasi yang baik untuk meminimalisir *misskomunikasi* dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena pada prosesnya pengguna SPSE seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan (PP) maupun Kelompok Kerja (Pokja) saling memiliki hubungan yang erat. Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik terkadang mengalami kendala pada koordinasi di beberapa OPD.

## 4. Penunjang

Saat daya listrik yang menunjang berbagai kegiatan pengadaan mati, timbullah kendala karena koneksi ke sistem terputus dan tidak dapat diakses. Kegiatan pengadaan yang tengah beroperasi tidak dapat ter-*backup* oleh sistem

karena ketiadaan daya listrik dan koneksi yang terputus. Alangkah baiknya hal semacam ini diantisipasi karena kendala demikian dapat mengganggu keamanan dan kestabilan sistem, serta dapat merugikan beberapa pihak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data yang disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *Good Governance* relatif sesuai apabila mengacu pada 3 elemen sukses penerapan *E-Government* menurut Indrajit (2000). Yang pertama yaitu elemen *support* yang menjelaskan bahwa diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Kota Batam, LKPP, Kepala Unit LPSE Kota Batam hingga berbagai pihak terkait seperti ULP, PPK, Pokja, Penyedia dan lain-lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Namun berkenaan dengan elemen *support*, masih ditemukan beberapa peraturan yang tidak konsisten, hal ini rawan menimbulkan kerancuan bagi pelaksana kebijakan tersebut.
2. Kemudian elemen yang kedua adalah *capacity* yang merupakan sumber daya untuk menunjang implementasi program *E-Procurement*. Walaupun terdapat beberapa kebutuhan yang belum dipenuhi secara keseluruhan, sumber daya yang tersedia pada Unit LPSE Kota Batam sudah cukup layak dalam memenuhi kebutuhan penerapan *E-Procurement*, sehingga sejauh ini



kegiatan *E-Procurement* di Unit LPSE Kota Batam dapat terlaksana dengan baik.

3. *Value* yang merupakan elemen terakhir berkenaan dengan sejauh mana keberhasilan dan manfaat yang diterima dari penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Penelitian ini menyajikan beberapa tabel yang merupakan *output* serta data penunjang lainnya yang menunjukkan bahwa Unit LPSE Kota Batam telah berhasil menerapkan *E-Procurement* dan memberikan mafaat bagi pihak-pihak terkait. Ketiga elemen tersebut turut mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang hendak dicapai oleh tata pemerintahan termasuk Unit LPSE kota Batam. Beberapa prinsip tersebut ialah; partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi konsesnsus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.
4. Kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *good governance* ditinjau oleh Penulis ke dalam dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Unit LPSE Kota Batam adalah terkait status Unit LPSE Kota Batam yang masih *ad hoc*, namun tengah diupayakan menjadi lembaga struktural, kemudian terkait anggaran, beban kerja, kebutuhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun beberapa sumber daya yang merupakan fasilitas penunjang lainnya, hal-hal tersebut penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Batam.

5. Kemudian kendala eksternal yang dihadapi oleh Unit LPSE Kota Batam adalah masih terdapat beberapa peraturan yang tidak konsisten, adanya kendala dalam pelaksanaan sosialisasi dan *training*, koordinasi dengan OPD lain serta beberapa fasilitas penunjang di luar kapasitas Unit LPSE Kota Batam. Terlepas dari proses penerapan *E-Procurement* dan beberapa kendala yang dihadapi, Unit LPSE Kota Batam perlu untuk terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan untuk pencapaian baru yang lebih baik dan guna menunjukkan kinerja yang lebih optimal dalam penerapan *E-Procurement*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penyajian data beserta analisa dan interpretasi data yang disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Unit LPSE Kota Batam sebaiknya berupaya untuk memastikan kembali hasil dari kegiatan *training* yang telah dilakukan, karena *training* merupakan salah satu bentuk sosialisasi terhadap para pengguna (*user*) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini penulis rekomendasikan karena untuk melihat keberhasilan atas penerapan *E-Procurement* ini kita perlu memastikan *value* yang dihasilkan dari penerapan *E-Procurement* itu sendiri. Penulis juga meyakini bahwa bila para pengguna (*user*) memiliki pemahaman dan kemampuan mengoperasikan sistem *E-Procurement* dengan baik, maka

kendala yang dihadapi dapat diminimalisir serta hal ini turut menjadi upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

2. Alangkah baiknya apabila berbagai kebutuhan Unit LPSE Kota Batam difasilitasi selengkap mungkin agar standar yang menjadi acuan dapat dicapai. Seperti halnya pengadaan ruangan khusus untuk *bidding room* di Unit LPSE Kota Batam yang terpisah dari unit lain, pengadaan *hardware* dan *software* serta berbagai kebutuhan perangkat kerja lainnya disediakan dengan kualitas terbaik. Tuntutan kebutuhan akan fasilitas ini penting untuk menjadi perhatian agar segala kegiatan pengadaan secara elektronik dapat berjalan sebaik mungkin.
3. Pihak-pihak yang terkait dengan segala kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik perlu menjalin koordinasi yang baik agar cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada sehingga tujuan *E-Procurement* dapat tercapai serta manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak.
4. Apabila status *ad hoc* Unit LPSE Kota Batam telah berganti menjadi lembaga struktural, alangkah baiknya seluruh Tim Pengelola LPSE Kota Batam mencurahkan konsentrasi yang lebih besar di LPSE agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Antara News. 2017. “Mayoritas Kasus Ditangani KPK Penyuapan Pengadaan Barang”, <http://www.antaraneews.com/berita/594775/mayoritas-kasus-ditangani-kpk-penyuapan-pengadaan-barang>, diakses pada 5 November 2017.
- E-Bisnis* Wordpress. 2017. “*E-Procurement*”, <https://ebisnis.wordpress.com/materi/e-procurement/>, diakses pada 5 November 2017.
- Australian Government Department Service. 2017. “*Procurement*”. Diakses dari: <https://www.finance.gov.au/agict/>, diakses pada 9 Mei 2018.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government “Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital”*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- J. Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 Pasal 130 ayat (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 Pasal 131 ayat (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2016. "Pengembangan *E-Government* Harus Selaras dengan Regulasi", [https://www.kominfo.go.id/content/detail/7016/pengembangan-ie-governmenti-harus-selaras-dengan-regulasi/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/7016/pengembangan-ie-governmenti-harus-selaras-dengan-regulasi/0/berita_satker), diakses pada 25 November 2017.
- Kompas Nasional. 2016. "Negara Rugi Hampir RP 1 Triliun dari Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/17234861/negara.rugi.hampir.rp.1.triliun.dari.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa>, diakses pada 2 November 2017.
- Landasan Teori. 2015. "Pengertian Good Governance", <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.html>, diakses pada 5 November 2017.
- Landell-Mills, Pierre and Ismail Serageldin. 1992. *Governance and the External Sector, in Proceeding of the World Bank Annual Conference on Development Economics*. Washington DC: World Bank.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. "*Akuntabilitas dan Good Governance*." Jakarta.
- Lexy Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- LKPP. 2017. "Beranda", <http://www.lkpp.go.id/v3/>, diakses pada 1 November 2017.
- LKPP. 2017. "Beranda Smart Report LPSE-LKPP", <http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda>, diakses pada 1 November 2017.

LKPP. 2017. “Tentang *E-Procurement*”, <https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang>, diakses pada 1 November 2017.

LPSE. 2017. “Tentang Kami”, <https://lpse.lkpp.go.id/eproc/tentangkami>, diakses pada 1 November 2017.

Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kota Batam. 2015. “Profil Kota Batam”, <https://batam.go.id/profil/>, diakses pada 26 Februari 2018.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang *e-Tendering*

Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa.

Republika. 2007. “KPK: Korupsi Paling Dominan di Pengadaan Barang/Jasa”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/11/07/breaking-news/nasional/10/12/01/149825-kpk-korupsi-paling-dominan-di-pengadaan-barang-jasa>, diakses pada 5 November 2017.

Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sugioyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2000. *Peran Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Makalah. Yogyakarta: Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wikipedia. 2017. “Layanan Pengadaan Secara Elektronik”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan\\_Pengadaan\\_Secara\\_Elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Pengadaan_Secara_Elektronik), diakses pada 1 November 2017.
- Wikipedia. 2017. “Pemerintahan Elektronik”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik), diakses pada 25 November 2017.



## INTERVIEW GUIDE

1. Seperti apakah gambaran umum Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam?
2. Bagaimanakah struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam?
3. Apakah dasar hukum pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam?
4. Apakah dasar hukum teknis operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam?

Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance* dalam penelitian ini ditinjau melalui tiga elemen, yaitu:

**a. Support**

5. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance*?
6. Bagaimanakah bentuk keterlibatan pihak-pihak yang terkait dengan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance*?

7. Seperti apakah bentuk dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* kepada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance*?

**b. Capacity**

8. Seperti apa kapasitas sumber daya yang dibutuhkan pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya terwujudnya *good governance*?
9. Seperti apa kapasitas sumber daya yang ada pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya terwujudnya *good governance*?

**c. Value**

10. Sejauh manakah keberhasilan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam telah memberikan manfaat? (Khususnya dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*).
11. Nilai/manfaat apa saja yang didapatkan dari penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance*?

12. Siapa sajakah yang menerima manfaat dari penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya terwujudnya *good governance*?
13. Apakah terdapat kendala pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *good governance*?
- Jika ya, maka peneliti akan meninjaunya dari dua faktor, yaitu meliputi:
- a. Faktor internal
  - b. Faktor Eksternal
14. Apakah saja kendala yang berasal dari dalam Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *good governance*?
15. Apakah saja kendala yang berasal dari luar Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *E-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *good governance*?



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre  
 Telp / Fax : (0778) 470620 Email : kesbangpolbatam@yahoo.co.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 700/55/Kesbangpol-Rekom/II/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
  2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15) ;
  3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
- Menimbang Surat dari : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor 938/UN10.F03.11.11/PN/2018 Perihal Riset/Survey.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : HEDINAR KHAIRUNNISYA
  - b. NIM/Perguruan Tinggi/Universitas : 145030101111060/Fakultas Ilmu Adminstrasi/UMBRAW
  - c. Untuk :
    - 1) Melakukan Rekomendasi Penelitian dengan berjudul " E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LPSE SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE"
    - 2) Lokasi Penelitian : Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam
    - 3) Waktu / Lama Penelitian : 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;
    - 4) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat;
    - 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Batam  
 Pada tanggal : 05 Februari 2018  
 an. KEPALA BADAN KESBANGPOL

KOTA BATAM  
 SEKRETARIS,

ZULKARNAIN, S.Sos  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 197012301990031008





PEMERINTAH KOTA BATAM  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre  
Telp / Fax : (0778) 470620 Email : kesbangpolbatam@yahoo.co.id

Batam, 05 Februari 2018

Nomor : 700/56/Kesbangpol-Rekom/II/2018  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth;  
Ketua LPSE Kota Batam

di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor 938/UN10.F03.11.11/PN/2018 Perihal Riset/Survey. Disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 700/56/Kesbangpol-Rekom/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 atas nama "E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LPSE SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE".

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Batam  
Pada tanggal : 05 Februari 2018

an. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KOTA BATAM  
SEKRETARIS,

  
**ZULKARNAIN, S.Sos**  
Pembina Tk. I. (IV/b)  
NIP. 197012301990031008

**Foto Bersama Bapak Indra Sufian (Kepala Unit LPSE Kota Batam) dan Ibu**

**Eka Putri Yunita (Admin PPE Unit LPSE Kota Batam)**



*Sumber: Dokumentasi Penulis*



## CURRICULUM VITAE

Nama : Hedinar Khairunnisya

Nomor Induk Mahasiswa : 145030101111060

Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 2 September 1996

Email : hedinarkhairunisya@yahoo.com

Pendidikan : 1. SD Kartini 2 Batam, 2002-2008  
2. SMP Kartini 2 Batam, 2008-2011  
3. SMA Kartini Batam, 2011-2014  
4. S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2014-2018

Pengalaman Kerja : Magang di Dinas Sosial dan Pemembrdayaan Masyarakat Kota Batam, 2017

Publikasi atau Karya Ilmiah : Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Unit LPSE Kota Batam sebagai Upaya Terwujudnya *Good Governance* (Studi pada Unit LPSE Kota Batam) Skripsi

